

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR  
PADA TAHUN 2018

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**RUSMITA**  
**167310645**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rusmita  
NPM : 167310645  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Turut Menyetujui

Pembimbing

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Data Wardana, S.Sos, M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rusmita  
NPM : 167310645  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Ketua



Data Wardana, S.Sos., M.IP

Sekretaris



Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.

Anggota



Septa Juliana, S.Sos., M.Si.

Mengetahui  
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 651/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 12 Agustus 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 13 Agustus 2020 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rusmita  
NPM : 167310645  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evalusi Program Penyediaan Rumah layak huni bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2018.**

Nilai Ujian : Angka : " 81,7 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data Wardana, S.Sos., M.IP.	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslani, S.IP., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 13 Agustus 2020

An-Bekar

**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

Wakil Dekan / Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 551/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rusmita
N P M	: 167310645
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2018.

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Data Wardana.,S.Sos.,M.IP  | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Nina Yuslani.,S.IP.,M.Si   | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Septa Juliana.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Septe Juliana.,S.Sos.,M.si | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rusmita  
NPM : 167310645  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020  
An. Tim Penguji  
Sekretaris

Ketua



Data Wardana, S.Sos, M.I.P



Nina Yuslimi, S.I.P., M.Si.

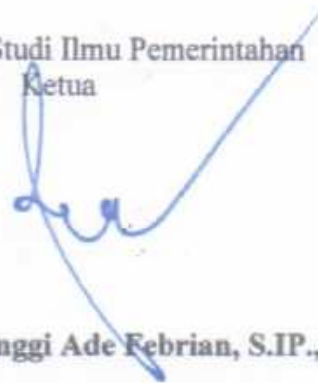
Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.I.P., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Rusmita  
NPM : 167310645  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Ketua

Sekretaris

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.

Anggota

Mengetahui

Septa Juliana, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini yang berjudul “**Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Usulan Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Data Wardana, S.sos, M.ip Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Usulan Penelitian ini.



6. Kepada keluarga tercinta terkhususnya kepada Ayahanda “Rusman Edi Marpaung (Alm)” dan ibunda “Sarinah” serta kedua adik saya “Jurnailis Marpaung&Ayu Septia Sari Marpaung” dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa mendo’akan, memberi semangat, dukungan dan support serta bantuan untuk penyelesaian Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan dikelas terkhusus nya kepada Rudianto Efendi, Nurfadilah, Natasya Kiki Mariska, Yuni Hartati, Herty Mista Riani Roza, Febby Dwi Ananda, dan Teman-Teman dikelas IP.H, serta yang lainnya juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang di pelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
8. Kepada seluruh pegawai Kantor Camat Pujud, Kepenghuluan pujud dan juga Pegawai Dinas Pengerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Dalam naskah Usulan Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Usulan Penelitian ini untuk kesempurnaan Usulan Penelitian penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menentukan khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru,24 Agustus 2020

Penulis

Rusmita

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Teori Pemerintah.....	22
2. Teori Ilmu Pemerintahan.....	24
3. Konsep Pemerintah Daerah .....	25
4. Manajemen pemerintah.....	27
5. Konsep Kebijakan Publik.....	29
6. Konsep Keuangan Daerah.....	30
7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	34
8. Konsep Evaluasi.....	35
9. Konsep Efektivitas .....	39
10. Konsep Pembangunan .....	40
B. Penelitian Terdahulu .....	42
C. Kerangka Pikir .....	44
D. Konsep Operasional .....	44

E. Operasional Variabel .....	46
F. Teknik Pengukuran .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Populasi dan Sampel .....	53
D. Teknik Penarikan Sampel .....	54
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	56
H. Jadwal Waktu Penulis .....	58
I. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	58

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Keadaan Geografis dan Demografis .....	60
B. Keadaan Pegawai berdasarkan Jumlah pegawai, jenis kelamin pegawai.....	61
C. Struktur Organisasi kecamatan pujud Kabupaten rokan Hilir .....	67

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	68
B. Hasil Penelitian Tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. ....	71

C. Hambatan-hambatan yang di hadapi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	98
---	----

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>102</b>
-----------------------------	------------



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Besar Jumlah Bantuan Rumah Layak Huni 2018-2019....	14
Tabel I.2 : Jumlah Dana bantuan rumah sehat layak huni yang Diterima Setiap kecamatan pujud kabupaten rokan hilir tahun 2017- 2019 .....	15
Tabel I.3 : Daftar Nama Penerima Rumah Bantuan Layak Huni diKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	17
Tabel I.3 : Daftar Nama tidak menerima Rumah Bantuan Layak Huni diKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	17
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel II.2 : Operasional Variabel tentang Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kepenghuluan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	46
Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Tentang Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	54
Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang “Evaluasi Program Penyediaan Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Pujud Desa Kepenghuluan Pujud Kabupaten Rokan Hilir .....	59
Tabel IV.1 Keadaan pegawai kantor camat pujud menurut jumlah pegawai.....	62
Tabel IV.2 : Keadaan pegawai kantor camat pujud menurut pengembangan karir.....	63
Tabel IV.3 : Keadaan Pegawai Kantor Camat Pujud menurut pangkat.....	63
Tabel IV.4 Umur dari Pegawai Kantor Camat Pujud .....	64
Tabel V.1 Jenis Kelamin Responden Penelitian .....	69
Tabel V.2 Umur Responden Berdasarkan Usia Termuda dan Usia Tertua .....	69
Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	70

Tabel V.4	Penilaian Responden Unsur Kepala Dinas, camat dan penghulu Tentang Indikator Efektifitas Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	72
Tabel V.5	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Efektifitas Pada Penelitian Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	74
Tabel V.6	Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghuluTentang Indikator Kecukupan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	77
Tabel V.7	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Kecukupan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	79
Tabel V.8	Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghuluTentang Indikator Pemerataan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	82
Tabel V.9	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Indikator Pemerataan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	84
Tabel V.10	Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghuluTentang Indikator Responsivitas Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	86
Tabel V.11	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Indikator Responsivitas Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	88

Tabel V.12	Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghuluTentang Indikator Ketepatan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	90
Tabel V.13	Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Indikator Ketepatan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	92
Tabel V.14	Rekapitulasi Unsur KepalaDinas, camat dan penghuluTentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .....	94
Tabel V.15	Rekapitulasi Unsur Masyarakat Tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir .....	44
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan hilir .....	66





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Data Telly .....	105
2. Lampiran Kuisisioner.....	106
3. Lampiran Wawancara .....	113
4. Lampiran Dokumentasi Penelitian .....	114
5. Lampiran Laporan Pencairan Dana Program Rumah Layak Huni .....	121



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmita  
NPM : 167310645  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferensif Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Agustus, 2020

Pelaku Pernyataan

Rusmita

# **EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR PADA TAHUN 2018**

## **ABSTRAK**

**RUSMITA**  
167310645

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis hasil kebijakan pemerintah provinsi riau khususnya diKabupaten Rokan Hilir dalam Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni disalah satu dikecamatan yaitu kecamatan pujud, dan Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam Program Bantuan Rumah sehat Layak Huni di kecamatan pujud. Indikator penilaian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 (lima) indikator penilaian yang dipergunakan yaitu Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketetapan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah Survey deskriptif yaitu memprioritaskan dari data, catatan lapangan, observasi kuisisioner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Populasi dan Sampel pada penelitian ini berjumlah 23 orang, Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Camat Pujud,Penghuluan Pujud, Masyarakat yang memperoleh Rumah Sehat Layak Huni berjumlah 12 orang dan Masyarakat yang tidak memperoleh Rumah Sehat Layak Huni berjumlah 8 orang. Jenis pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu dari data primer, data sekunder struktur organisasi Kecamatan. Dan untuk tenkin analisis data diperjelas dengan hasil Observasi, Kuisisioner, Wawancara, dokumentasi, data tersebut dianalisis dan diolah menjelaskan tujuan dari penelitian ini, selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian untuk diambil kesimpulan bahwa Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2018.

Kata kunci : Evaluasi,Program, Penyediaan, Rumah.

**EVALUATION OF PRIVATE HOUSE FOR PROVIDING PROGRAMS  
FOR POOR COMMUNITIES IN PUJUD DISTRICT, ROKAN HILIR  
DISTRICT, IN 2018**

**ABSTRACT**

RUSMITA  
167310645

*This study aims to determine and analyze the results of the Riau provincial government policy especially in the Rokan Hilir District in the Livable Healthy Home Assistance Program in one of the sub-districts, Pujud District, and to find out the obstacles in the implementation of government policy in the Decentable Healthy Home Assistance Program in Pujud District. The assessment indicators used by the author in this study are as many as 5 (five) assessment indicators used, namely Effectiveness, Adequacy, Equity, Responsiveness, Resolution. The type of research located in Pujud District, Rokan Hilir Regency is a descriptive survey, prioritizing data, field notes, questionnaire observations, interviews and documentation as data collection tools. The population and sample in this study amounted to 23 people, the Head of the Department of Housing, Residential and Land Areas of Riau Province, the District Head of Pujud, Impulse of Pujud, the number of people who received Livable Healthy Homes was 12 people and the people who did not get Livable Healthy Homes were 8 people. The type of data collection used in this study is from primary data, secondary data from the organizational structure of the District. And for data analysis tenkin clarified with the results of Observation, Questionnaire, Interview, documentation, the data were analyzed and processed to explain the purpose of this study, then compared with theories related to the title of the study to conclude that the Evaluation of the Provision of Occupable Houses for Communities Poor in Pujud District, Rokan Hilir Regency in 2018.*

*Keywords: Evaluation, Program, Provision, Home.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Rumah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 ialah bangunan gedung sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Rumah adalah tempat terpenuhinya berbagai kebutuhan dan pelaksanaan peran dalam keluarga, rumah menjadi media untuk interaksi sosial, tranfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga dan bahkan menjadi simbol status. Demikian besar fungsi bagi keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial, oleh karena itu, berdasarkan ke 3 (tiga) fungsi tersebut, maka menjadi tempat berlindung, syarat mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjadi media yang baik bagi pelaksanaan, bimbingan,serta pendidikan keluarga, pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut, bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong masyarakat miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga, tempat memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental, dan sosial. Layak huni menurut Undang-Undan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011, adalah rumah yang mempunyai ruang yang berfungsi sesuai dengan fungsinya dan memenuhi kebutuhan akan penghawaan dan pencahayaan dan Permenpera No. 22/PERMEN/M/2008 menyebutkan bahwa Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minumum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Program Rumah Sehat Layak Huni adalah program pemerintah provinsi riau sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, salah satu program pemerintah provinsi riau ini ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu, dengan maksud untuk meringankan beban masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Bentuk Program Rumah Sehat Layak Huni yang dimaksud pada penelitian ini adalah pembangunan lama yang sudah tidak layak tersebut dihancurkan semua lalu digantikan dengan bangunan yang baru diatas lokasi yang sama kenapa diatas lokasi yang sama dikarenakan syarat khusus dalam penerimaan Rumah Bantuan Layak Huni itu ialah memiliki sebidang tanah minimal tanah tersebut berukuran panjangnya sekitar 10X10 meter dan lebar lahannya sekitar 6X6 dan diatas lahan tersebutlah berdirinya Rumah yang tidak layak tersebut dan itulah yang menjadi bukti bahwa masyarakat tersebut bisa mendapatkan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni dari Provinsi tersebut dan nama dari program Provinsi tersebut dinamakan **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni.**

Waktu pengerjaan dari Program Rumah Sehat Layak Huni ada dicantumkan dalam perjanjian kontrak kerja antara Pokmas dengan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Diprovinsi Riau, untuk yang ditahun 2018 isi perjanjian pengerjaannya itu berlangsung selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal yang ditetapkan antara Pokmas dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Diprovinsi Riau dari tanggal 04 juli 20018 sampai dengan 30 Desember 2018 kontrak kerja ini telah disepakati

dan ditandatangani antara Pokmas dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Diprovinsi Riau dan untuk penyerahan rumah bantuan tersebut tidak langsung diserahkan ada masa pemeliharaan dimana pemerintah dalam waktu satu tahun pertama masih mengontrol atau memantau rumah bantuan tersebut dan dalam masa pemeliharaan itu masyarakat yang mendapatkan rumah bantuan tersebut tidak boleh mengubah atau menambah bangunan karena petugas lapangan mengambil titik koordinat pada saat rumah bantuan itu dibangun dan pada masa pemeliharaan petugas akan memantau, biasanya bangunan itu bisa tambahan setelah masa pemeliharaan itu berakhir barulah masyarakat yang mendapatkan bisa menambah kan bangunan yang diinginkan jika memiliki uang yang lebih.

Pemerintah Provinsi membuat Program Rumah Sehat Layak Huni ini agar masyarakat nya lebih sejahtera, lebih bisa membuat keluarga yang kurang mampu bisa hidup dan tinggal dirumah yang selayaknya, seperti orang-orang yang bisa membangun rumah sendiri, dan pemerintah Provinsi tidak pernah menetapkan dalam setiap tahunnya berapa jumlah yang akan dikeluarkan untuk setiap daerah atau desa. untuk Kabupaten Rokan Hilir Pemerintah Provinsi ditahun 2017 itu menyerahkan 151 Unit, ditahun 2018 167 Unit, dan ditahun 2019 itu sebanyak 172 Unit rumah sehat layak huni, untuk masyarakat, penyerahan dilakukan secara bersama dengan Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

kepada masyarakat yang menerima Rumah Sehat Layak Huni Pemerintah Provinsi Riau berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat rumah layak huni sebaik-baiknya dan paling penting dimanfaatkan dengan baik dan tidak diperjual

belikan. Program pemerintah provinsi ini adalah salah satu program yang diprioritaskan Gubernur Riau mengenai pembangunan pemukiman masyarakat terlebih didaerah pedesaan. Salah satunya diKepenghuluan Pujud Kabupaten Rokan Hilir membangun Rumah Sehat Layak Huni dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan harapan gubernur riau bisa memberantas kemiskinan didaerah yang ada diProvinsi Riau salah satu nya dikabupaten Rokan Hilir Kecamatan Pujud.

Adapun teknis pembangunannya itu mengacu kepada standar operasional prosedur (Bestek) atau melalui tolak ukur dalam menentukan kualitas suatu bahan tersebut, gambar detail bangunan, dan untuk tahun 2018 itu dilaksanakan oleh CV.Fajar Bahari. Dan untuk pembangunan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu type 36 (tiga enam), dan bahan yang digunakan sudah sesuai dan untuk ukuran bahan dan kualitas sesuai.

manfaat dari Program Rumah Sehat Layak Huni itu sendiri adalah:

1. Untuk menjesahterakan masyarakatnya, terutama masyarakat yang kurang mampu.
2. Untuk mengurangi angka kemiskinan
3. Mewujudkan harapan masyarakat yang kurang mampu, dalam memiliki rumah yang layak dan fasilitas yang memadai.

Adapun tujuan dari program Rumah Sehat Layak Layak Huni (RSLH) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak atas masyarakat miskin atau perumahan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat membangun rumah yang layak huni.
3. Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan.



Sasaran dari pelaksanaan program kegiatan tersebut adalah masyarakat-masyarakat miskin menempati perumahan yang tidak layak memenuhi standar atau dengan kata lain Rumah Tidak Layak Huni dan lingkungan kumuh. Miskinan yang dimaksud dalam penelitian ini itu ialah kemiskinan dalam sebuah masyarakat dimana masyarakat tersebut tidak memiliki rumah yang layak dan tidak mampunya masyarakat tersebut membangun rumah dengan sesuai standar yang semestinya, tidak memiliki penghasilan yang mencukupi dalam perminggunya atau perbulannya, dan yang dimaksud Rumah tangga miskin adalah dimana kondisi masyarakat tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana dasar dilingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, serta memiliki mata pencaharian yang tidak tetap. Dan maksud dari masyarakat yang berpenghasilan rendah disini ialah masyarakat dengan keterbatasan daya beli sehingga perlunya dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah yang selayaknya. Adapun sasaran pelayanan program Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 20 kepala keluarga (kk) di Kelurahan Pujud dan di kepenghuluan pujud dan masyarakat yang mendapatkan sebanyak 12 keluarga (kk) dari program pemerintah Provinsi, dan alasan dari kenapa hanya 12 (kk) yang mendapatkan dikarenakan dari 20 (kk) yang diajukan hanya 12 (kk) tersebutlah yang lolos ditahap verifikasi dilapangan, kebanyakan dari masyarakat tersebut mengajukan permohonan kepada kepenghuluan dengan data yang kurang akurat dan pada saat proposal diajukan keDinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Diprovinsi Riau dan lalu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan provinsi Riau

melakukan verifikasi langsung terjun kelapangan untuk melihat langsung lokasi-lokasi yang akan mendapatkan Rumah bantuan dari pemerintah provinsi, dan alasan kenapa hanya 12 (kk) yang mendapatkan karena yang 12 (kk) inilah yang lolos verifikasi survey lapangan oleh petugas yang menangani Program provinsi ini, dan 8 (kk) yang tidak mendapatkan Rumah bantuan dari pemerintah provinsi padahal telah mengajukan permohonan kepenghuluan dan pihak kepenghuluan. telah menyerahkan permohonan masyarakat-masyarakat tersebut ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan provinsi Riau dan pada saat verifikasi lapangan dilakukan oleh petugas ternyata yang 8 (kk) tersebut kebanyakan tidak memiliki lahan, ada juga masyarakat yang mengajukan memiliki lahan tetapi rumah yang tidak layak tersebut tidak berdiri diatas lahan bisa dibidang lahannya baru saja dibeli dan rumah yang tidak layak yang diajukan permohonan nya dulu hanyalah rumah yang masyarakat tumpangi, dan ada juga dari masyarakat tersebut yang mengajukan permohonan dengan kondisi rumah yang diajukan itu dalam keadaan kosong tidak ditempati oleh pemiliknya, pemiliknya memilih untuk tinggal dengan keluarga atau mengontrak rumah. Dari kondisi diatas pemerintah provinsi Riau dan pemerintah kabupaten rokan hilir memberikan kebijakan untuk memberikan bantuan rumah Sehat layak huni bagi masyarakat miskin dikabupaten rokan hilir salah satunya diKepenghuluan pujud dengan syarat dan ketentuan berdasarkan dengan peraturan yang telah ditetapkan, untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan serta kecukupan yang luas bagi masyarakat, adapun kriteria yang berhak menerima bantuan Rumah Layak Huni tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kondisi Rumah

Kondisi rumah yang dimiliki sudah tidak layak lagi untuk ditempati misalnya seperti atap rumahnya atau rangka atap rumah yang sudah lapuk, seng yang sudah rusak, lantai plasteran rumah yang sudah rusak, bahan dinding seperti bilik bambu atau kayu kualitas jelek sudah rapuh atau retak-retak, tidak memiliki fasilitas kamar mandi dan jamban baik didalam atau diluar rumah serta tidak memiliki sambungan listrik sendiri.

b. Letak dan Status Rumah

Rumah calon penerima Rumah Layak Huni bukan milik asrama instansi atau sebagainya, rumah calon penerima bukan termasuk rumah dalam waktu kredit perbankan, rumah calon penerima tidak berdiri diatas tanah negara/pemerintah dan tidak juga rumah calon penerima berdiri diatas lahan larangan pemerintah seperti tanah kas desa, tanggul sungai, waduk, trotoar, dan ruang milik jalan, status rumah sipenerima harus jelas harus dibuktikan dengan photo copy sertifikat hak atas tanah atau keterangan memiliki tanah tersebut dari kepala desa atau lurah, dan calon penerima harus memiliki tanah minimal panjang 10 X 10 meter dan lebar 6x6 , dan sipenerima berada dibawah ekonomi rata-rata, dan apabila calon penerima tidak memiliki tanah/lahan sendiri maka sicalon penerima tidak berhak untuk mendapatkan Rumah Bantuan Layak Huni tersebut, karena syarat khusus untuk mendapatkan bantuan program Rumah Layak Huni itu harus memiliki tanah sendiri dan tanda bukti rumah yang tidak layak huni berdiri diatas tanah tersebut.

c. Pemilik Rumah

Berdomisili tetap (penduduk) kurang lebih 5 (Lima) tahun bertempat tinggal dikepenghuluan tersebut atau lokasi rumah yang ditempati sendiri, (*lampiran photo copy KTP, dan photo copy KK*), Masyarakat yang mengusulkan Bel pernah mendapatkan bantuan program pembangunan perumahan layak huni atau bantuan pemerintah lainnya untuk program perumahan.

d. Kepala Keluarga atau anggota keluarga tidak memiliki mata pencarian tetap dengan standar gaji dibawah upah minimum dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak.

Tahap pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni:

1. Sosialisasi pembentukan pokmas kepada kepala desa/kelurahan terpilih;
2. Musyawarah desa/kelurahan pemilihan ketua pokmas (kelompok masyarakat);
3. Rembuk warga penyiapan gambar rencana dan rab sesuai prototype (harga sesuai hasil survey pokmas di lapangan) didampingi oleh konsultan;
4. Penyiapan administrasi pencairan (dana masuk kerekening pokmas);
5. Pelaksanaa fisik pembangunan, berita serah terima hasil pembangunan.

Pesyaratan pengajuan Permohonan Bantuan Pembangunan Rumah Layak

Huni :

1. Surat permohonan diajukan oleh kepala desa/lurah
2. Photo copy surat keterangan pemilik rumah
3. Photo copy kartu keluarga (KK)
4. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP)
5. Foto rumah yang tidak layak huni

Pelaksanaan dan Pembiayaan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni bagi masyarakat miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi Riau, Mekanisme penganggaran, pelaksanaa, pencairan dana dan serah terima bagi masyarakat miskin Dikabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

#### **1. Mekanisme pengusulan**

- 1) Calon penerima bantuan Rumah Layak Huni menyampaikan usulan kepada Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/Lurah melakukan musyawarah untuk menentukan pantas atau tidaknya calon penerima bantuan pembangunan rumah layak huni, hasilnya disampaikan dalam musyawarah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- 2) Hasil musyawarah dalam bentuk proposal disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Layak Huni.
- 3) Proposal berisikan tentang daftar nama calon penerima dan alamat dengan melampirkan persyaratan administrasi kependudukan dan bukti hak atas tanah.
- 4) Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Layak Huni melakukan verifikasi data usulan atas kelayakan calon penerima bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni.
- 5) Hasil verifikasi lalu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Kepala Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Layak Huni.
- 6) Keputusan Kepala Dinas/Kepala Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Layak Huni mengeluarkan nama-nama serta alamat penerima bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni.

- 7) Keputusan merupakan dasar bagi Kepala Dinas/Kepala Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Layak Huni untuk melaksanakan Pembangunan.

## 2. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola oleh kelompok masyarakat (POKMAS)

- a) Kepala Desa/Lurah melaksanakan musyawarah untuk membentuk pengurus Pokmas sebagai pelaksana swakelola bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni.
- b) Pengurus Pokmas terdiri atas :
  1. Ketua;
  2. Bendahara; dan
  3. Tim Persiapan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.
  4. Keanggotaan Pengurus Pokmas diupayakan berasal dari unsur masyarakat yakni Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan dilingkungan Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang memiliki pengalaman atau mengerti pekerjaan bangunan rumah.
  5. Pokmas sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- a) Kepala Desa/Lurah mengusulkan daftar calon penerima rumah layak huni melalui proposal permohonan bantuan rumah layak huni kepada Camat dan ada juga daerah yang tidak mengusulkan Camat tetapi langsung ke Provinsi untuk dilakukan verifikasi terhadap nama-nama yang diusulkan.
- b) Camat atau kepala desa nya langsung menyampaikan rekomendasi atau proposal permohonan calon penerima rumah layak huni kepada provinsi melalui dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan diprovinsi

Riau dengan dilengkapi data pendukung sesuai dengan kriteria ditetapkan.

- c) Setelah proposal permohonan masuk datanya diverifikasi setelah sesuai dengan ketentuan barulah bisa ditetapkan oleh satuan perangkat daerah dan setelah itu baru dimuatkan ke rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk dibahas nama sipenerima, dan riwayat penerima harus lengkap.
- d) Setelah disetujui barulah terbit dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) barulah bisa dilaksanakan program tersebut.

Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Sehat Layak Huni. memberikan pelatihan tentang mekanisme penyiapan administrasi dan teknis pelaksanaan, serta pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.

### **3. Mekanisme Penganggaran dan Pencairan Dana**

#### **a. Penganggaran**

- 1) Pendanaan bantuan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni. bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pendanaan dilaksanakan melalui penganggaran barang/jasa/uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.

#### **b. Pencairan Dana**

- 1) Pencairan Dana bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni dilakukan setelah Pokmas menandatangani kontrak dan telah melengkapi semua persyaratannya dan telah disetujui oleh Kepala Dinas/Kepala Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Layak Huni.

- 2) Pencairan dana bantuan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuatan Komitmen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan Ketua Pokmas yang telah ditetapkan.
- 3) Pencairan dana dilakukan melalui mekanisme transfer bank kepada rekening Pokmas.
- 4) Pencairan dana melalui mekanisme transfer bank dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran tahap pertama sebesar 40% dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dengan Pola Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat POKMAS.
  - 2) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibayarkan apabila telah menyelesaikan fisik kegiatan minimal 30% dari total target fisik kegiatan,
  - 3) Pembayaran tahap ketiga sebesar 30% dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibayarkan pada saat progress fisik pelaksanaan kegiatan mencapai minimal 60% berdasarkan laporan progress fisik dan keuangan.

#### **4. Laporan pertanggung jawaban**

berupa kwitansi pembelian bahan/material jadi konstruksi bangunan dari daeler atau toko atau distributor atau bengkel/pabrik sudah termasuk pajak dan biaya retribusi lainnya.

#### **5. Serah Terima**

- a. Serah terima pekerjaan pembangunan Rumah Sehat Layak Huni adalah pembangunan Rumah Sehat Layak Huni yang telah selesai dilaksanakan, maka berdasarkan pelimpahan wewenang oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Diprovinsi Riau dilaksanakan penyerahan kepada penerima bantuan hibah rumah sehat layak huni berdasarkan : Surat keputusan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Diprovinsi Riau tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa.



- b. Naskah perjanjian hibah daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
- c. Bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah barang/jasa.

Mekanisme pelaporan pengawasan dan Evaluasi Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin.

### 1. Pelaporan

- a) Laporan sebagaimana dimaksud berupa laporan keuangan dan foto sebelum, sedang dan setelah hasil pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni. Laporan disampaikan oleh Ketua Pokmas kepada PPK paling lambat sebelum akhir pelaksanaan terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke rekening Pokmas.
- b) Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- c) Laporan pertanggungjawaban melampirkan:
  - 1). Berita acara hasil pelaksanaan;
  - 2). Laporan penggunaan dana;
  - 3). Kuitansi dan faktur; dan
  - 4). Foto copy buku tabungan.

### 2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Miskin diawasi kelompok masyarakat dan konsultan manajemen wilayah secara berkala Provinsi Riau.

### 3. Evaluasi

- a) Dinas/Perangkat Daerah yang menangani program Rumah Layak Huni sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan.

- b) Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan Pembangunan.
- c) Evaluasi dilakukan pada tahap pelaksanaan pencairan dana tahap III.

**Tabel 1.1 Besar Jumlah Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Nilai	Keterangan
1	2017	Rp.50.000.000,-	50.000.000,-	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018
2	2018	Rp.55.000.000,- Rp.60.000.000,	55.000.000, sampai 60.000.000,-	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018
3	2019	Rp.55.000.000,- Rp.60.000.000,	55.000.000, sampai 60.000.000,-	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018

*Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.*

Dilihat dari tabel diatas, dapat kita ketahui berapa besarnya dana rumah bantuan sehat layak huni yang diturunkan.dari tahun 2017 Program Rumah Sehat Layak Huni ini biaya yang diturunkan untuk satu unit rumah itu sebesar Rp.50.000.000, dan untuk ditahun 2018 dan 2019 itu pembiayaannya berbeda dengan 2017,pembiayaan ditahun 2018 dan 2019 itu disesuaikan dengan harga-harga dana upah setempatdan dibagi menjadi empat wilayah. Wilayah yang pertama itu daerah pekanbaru, Kampar dan Rokan Hulu itu biaya yang diturunkan untuk satu unit rumahnya sebesar Rp.55.000.000, diwilayah kedua itu Kuansing,Pelelawan, dan Indragiri Hulu,itu biaya yang diturunkan persatu unit rumahnya sebesar Rp.57.500.000, untuk wilayah ketiga itu diMeranti, Siak,Indragiri Hilir itu satu unit rumahnya sebesar Rp.60.000.000, dan untuk wilayah yang keempat itu didaerah Dumai, Bengkalis, dan Rokan Hilir itu dana yang diturunkan sebesar Rp. 60.000.000. dibiayai oleh APBD, pengerjaannya dilaksanakan oleh Proses pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS) dan untuk usulan penelitian ini difokuskan pada pengerjaan tahun 2018.

Berikut besaran dana rumah layak bantuan yang diterima oleh setiap kecamatan yang ada dikabupaten rokan hilir.

**Tabel 1.2 : Jumlah Dana bantuan rumah layak huni yang diterima setiap kecamatan yang ada dikabupaten rokan hilir tahun 2017-2019.**

No	Kecamatan	RSLH	Nilai
1	2	3	4
<b>2017</b>			
1	Bangko	-	-
2	Kubu	40 Unit	Rp. 2.200.000.000,-
3	Tanah Putih	-	-
4	Rimba Melintang	22 Unit	Rp. 1.210.000.000,-
5	Bagan Sinembah	-	-
6	Pasir Limau Kapas	-	-
7	Sinaboi	-	-
8	Tanah Putih Tanjung Melawan	-	-
9	<b>Pujud</b>	-	-
10	Bangko Pusako	26 Unit	Rp. 1.430.000.000,-
11	Simpang Kanan	-	-
12	Batu Kampar	-	-
13	Rantau Kopar	-	-
14	Pekaitan	-	-
15	Kubu Babusalam	63 Unit	Rp. 3.780.000.000,-
16	Balai Jaya	-	-
17	Bagan Sinembah Raya	-	-
18	Tanjung Medan	-	-
<b>2018</b>			
1	Bangko	-	-
2	Kubu	25 Unit	Rp. 1.500.000.000,-
3	Tanah Putih	19 Unit	Rp. 1.140.000.000,-
4	Rimba Melintang	-	-
5	Bagan Sinembah	6 Unit	Rp.360.000.000
6	Pasir Limau Kapas	-	-
7	Sinaboi	-	-
8	Tanah Putih Tanjung Melawan	45 Unit	Rp.2.700.000.000,-
9	<b>Pujud</b>	<b>12 Unit</b>	<b>Rp.720.000.000,-</b>
10	Bangko Pusako	28 Unit	Rp. 1.680.000.000,-
11	Simpang Kanan	-	-
12	Batu Kampar	-	-
13	Rantau Kopar	-	-
14	Pekaitan	-	-

1	2	3	4
15	Kubu Babusalam	-	-
16	Balai Jaya	8 Unit	Rp. 480.000.000,-
17	Bagan Sinembah Raya	-	-
18	Tanjung Medan	9 Unit	Rp. 540.000.000,-
<b>2019</b>			
1	Bangko	10 Unit	Rp. 60.000.000,-
2	Kubu	24 Unit	Rp. 1.440.000.000,-
3	Tanah Putih	5 Unit	Rp. 300.000.000,-
4	Rimba Melintang	26 Unit	Rp. 1.560.000.000,-
5	Bagan Sinembah	4 Unit	Rp. 240.000.000,-
6	Pasir Limau Kapas	5 Unit	Rp. 300.000.000,-
7	Sinaboi	5 Unit	Rp. 300.000.000,-
8	Tanah Putih Tanjung Melawan	24 Unit	Rp. 1.440.000.000,-
<b>9</b>	<b>Pujud</b>	<b>16 Unit</b>	<b>Rp.960.000.000,-</b>
10	Bangko Pusako	17 Unit	Rp.1.020.000.000,-
11	Simpang Kanan	-	-
12	Batu Hampar	9 Unit	Rp. 540.000.000,-
13	Rantau Kopar	-	-
14	Pekaitan	-	-
15	Kubu Babusalam	9 Unit	Rp. 540.000.000,-
16	Balai Jaya	8 Unit	Rp. 480.000.000,-
17	Bagan Sinembah Raya	-	-
18	Tanjung Medan	10 Unit	Rp.60.000.000,-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Dilihat dari tabel diatas kabupaten rokan hilir mendapatkan rumah bantuan sehat layak huni sebanyak 497 unit dimulai dari tahun 2017 itu sebanyak 173, ditahun itu kecamatan pujud tidak mendapatkan rumah bantuan tersebut baik dari provinsi maupun dari kabupaten, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan biaya dan ada juga yang daerahnya yang tidak terjangkau. ditahun 2018 mendapatkan 152 unit kecamatan pujud sendiri mendapatkan 12 unit rumah bantuan layak huni. Dan ditahun 2019 kecamatan pujud mendapatkan 16 unit dan jumlah keseluruhan yang mendapatkan rumah bantuan itu ditahun 2019 dikabupaten rokan hilir yaitu sebanyak 172 unit.

Dilihat dari tabel 1.II diatas ada beberapa kecamatan yang tidak mendapatkan Rumah bantuan sama sekali itu dikarenakan bukan dari Pemerintah Provinsinya melainkan dari kecamatannya dimana kecamatan itu tidak mengajukan permohonan keprovinsi untuk bantuan dari Program Pemerintah tersebut dengan beberapa hal seperti kecamatan itu tidak mengajukan dikarenakan bajet yang minim dan daerah tersebut susah dijangkau karena mengingat jarak tempuh, biaya tranport dan harga material yang mahal jadi kepenghuluan memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan Bantuan dari Program Pemerintah Provinsi tersebut.

**Tabel 1.3. : Daftar Nama Penerima Rumah Bantuan Layak Huni diKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Nama	Alamat	Umur
1	Amat .B	Kep Pujud Rt/Rw,002/002	65 tahun
2	Atan	Kep Pujud, Rt/Rw,001/002	72 tahun
3	Depsy Yusita	Kep Pujud Rt/Rw,002/001	42 tahun
4	Djasri Suki	Kep Pujud Dusun I kepenghuluan Pujud	52 tahun
5	Efriati	Kep Pujud Rt/Rw,002/001	57 tahun
6	Erdi Efendi	Kep Pujud Rt/Rw,001/001	75 tahun
7	Haromah	Kep Pujud Rt/Rw,001/003	62 tahun
8	Sarimah	Kep Pujud Rt/Rw 002/003	53 tahun
9	Sariputdin	Kep Pujud, Rt/Rw,001/002	68 tahun
10	Syamsul Harahap	Kep Pujud Kampung Tiga Rt/Rw 002/002	50 tahun
11	Rodiah	Kep Pujud Kampung Tiga Rt/Rw 002/002	52 tahun
12	Uli	Kep Pujud Rt/Rw,001/003	74 tahun

*Sumber kantor : kepenghuluan pujud 2018*

Dilihat dari tabel diatas penulis mencantumkan nama-nama masyarakat yang menerima rumah bantuan layak huni ditahun 2018, penerimanya yaitu sebanyak 12 orang dan berasal dari masyarakat kepenghuluan pujud, ditahun 2018

didaerah kelurahan pujud itu tidak ada yang menerima rumah bantuan sehat layak huni tetapi ditahun 2019 masyarakat kelurahan mendapatkan 4 unit rumah bantuan sehat layak huni dan 12 unit lagi itu masyarakat kepenghuluan yang mendapatkan.

**Tabel 1.4. : Daftar Nama Yang Tidak Mendapatkan Rumah Bantuan Layak Huni diKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Nama	Alamat	Umur
1	Asrul Ray Anggara	Jl. Utama Sungai Pinang	44 Tahun
2	Boiman	Kampung Tiga	66 Tahun
3	Mariana	Sosopan	46 Tahun
4	Nuraini	Kelurahan Pujud	50 Tahun
5	Junaidi	Sungai Pinang	44 Tahun
6	Salmah	Sungai Pinang	45 Tahun
7	Simas	Pujud	57 Tahun
8	Warso	Pematang Genting	32 Tahun

*Sumber kantor : kepenghuluan pujud 2018*

Tabel 1.4 adalah daftar nama-nama masyarakat yang tidak mendapatkan Rumah bantuan dari Program Pemerintah dikarenakan tidak memenuhi kriteria. Tetapi Delapan (8) KK ini diajukan Desa keBantuan lain yang dari pemerintah baik dari Provinsi maupun Kabupaten.

Dari pengamatan sementara dilapangan pelaksanaan program Bantuan Rumah Layak Huni diKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. belum berjalan dengan baik, karena masih belum sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Namun berdasarkan pengamatan awal penulis dilapangan mengenai program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni terindikasi permasalahan dalam pelaksanaan Program Rumah Layak Huni tersebut :

1. Ditinjau dari indikator Efektifitas pelaksanaan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir disalah satunya diKepenghuluan Pujud belum efektif, dikarnakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan Rumah Layak Huni tersebut, Tetapi kuota rumah bantuan tidak mencukupi, Namun ditahun berikutnya tidak ada jaminan untuk masyarakat dan tidak dapat dipastikan juga apakah masyarakat yang membutuhkan itu mendapatkan rumah bantuan tersebut atau tidak, Sedangkan masyarakat sangat membutuhkan rumah bantuan tersebut.
2. Untuk masyarakat yang tidak mendapatkan Rumah bantuan yang dikarenakan masyarakat itu tidak menempati rumah yang tidak layak huni. Selain itu rumah tidak layak huni tersebut tidak berdiri diatas lahan masyarakat itu sendiri, melainkan rumah yang didirikan diatas lahan masyarakat lain atau meminta izin untuk membangun rumah tersebut diatas lahan masyarakat lain tersebut.maka dari itulah masyarakat yang 8 (kk) itu tidak mendapatkan program pemerintah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 .**”

## B. Rumusan masalah

Dari pengamatan sementara dilapangan program bantuan rumah layak huni di kecamatan pujud salah satu ialah dikepenghuluan pujud kabupaten rokan hilir belum tepat sasaran karena masih banyaknya masyarakat miskin belum mendapatkan rumah bantuan tersebut. Sedangkan sasaran rumah sehat layak huni bagi masyarakat miskin kabupaten rokan hilir adalah masyarakat yang menempati/mempunyai rumah yang tidak layak berdasarkan standar kualitas,kesehatan dan kecukupan luas suatu bangunan.

Berdasarkan pengamatan awal dan sekelumit permasalahan dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah **“Evaluasi Program Penyediaan Rumah Sehat Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2018”**.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil kebijakan pemerintah provinsi riau khususnya diKabupaten Rokan Hilir dalam Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni disalah satu dikecamatan yaitu kecamatan pujud. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam Program Bantuan Rumah sehat Layak Huni di kecamatan pujud.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis



Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan serta memperkaya kajian ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai evaluasi kebijakan.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masuka dan informasi bagi pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam rangka evaluasi program kesejahteraan masyarakat.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan landasan teori serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan, evaluasi program tentang Program bantuan rumah layak huni, untuk menjadi acuan dari penelitian ini hingga diharapkan tidak keluar dari rangka dan tujuan penelitian yang dimaksud.

##### 1. Konsep pemerintah dan Pemerintahan

Didalam kitab suci Al-Qur'an (3,104) ada dijelaskan mengenai pemerintah itu adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang, dari hal buruk, itulah orang yang beruntung (dalam Rahman, 2009;2).

Sedarmayanti (2004:9) mengatakan bahwa pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia.
2. Untuk Memajukan kesejahteraan umum.
3. Untuk Mencerdaskan kehidupan Bangsa.
4. Untuk Melaksanakan Ketertiban Umum, perdamaian Abadi dan keadilan Sosial.

Rasyid dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015:28) menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses penegakan dan memelihara keadilan,

menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yakni hirarki, yaitu pelayanan (*servis*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

Samuel Edward Finer (S.E.Finer:1974) menyampaikan pernyataan bahwa istilah ‘government’. Paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti :

- 1) Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. (*the activity or the process of governing*);
- 2) Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) nrgara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai (*states of affairs*);
- 3) Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*);
- 4) Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

R.Mac Iver (1947) memberikan pendapat mengenai *Government is the organization of men under authority how man can be governed* (pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah).

C.F. Strong (1960) mencantumkan pendapatnya dalam bukunya *Modern Political Constitutions* menyatakan : Pemerintah (han) oleh karenanya, adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah (han) dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kementrian-kementrian, suatu arti yang biasa kita pakai dalam pembicaraan dewasa ini apabila Pemerintah (han) dalam arti luas,

diberi tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, didalam maupun diluar, Pemerintah (han) harus memiliki, pertama, kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata; kedua, kekuasaan legislatif, atau sarana pembuatan hukum; ketiga, kekuasaan keuangan, yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama negara.

Menurut Munaf (2016,47) bagaimanakah pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namu dalam paradig baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintah/Negara.

## **2. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Soewargono (dalam Ndraha, 2010:16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari pekerjaanya struktur-struktur dan proses pemerintah umum, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya menurut Musanef (dalam syafiie,2011:8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Labobo (2011;2) menyatakan ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan diperintah.

Menurut Rasyid (dalam Iobolo, 2007:22) membagi fungsi pemerintahan dalam empat bagian yaitu pelayanan (*public service*). Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengatur (*regulation*), selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Menurut Ndraha (2005:7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan terdiri dari :

1. Yang diperintah
2. Tuntunan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil)
3. Pemerintahan
4. Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintah.

### **3. Konsep Pemerintah Daerah**

Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjelaskan otonomi

seluas-luasnya. Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu :

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan urusan pemerintahan absolut meliputi :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertanahan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fisik dan
- f. Agama

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat :

- a. Melaksanakan sendiri atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren meliputi :

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib urusan pemerintahan pilihan.
2. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagaimana substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah **Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman**.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dijalankan dengan :

Asas Desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal diwilayah tertentu.

Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### **4. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Menurut Kritiadi (dalam bukunya zaidan nawawi (2013 :21) mengatakan bahwa manajemen pemerintahan tidak lain adalah factor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut di wujudkan dalam berbagai pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakat. Sementara George Terry (dalam Inu Kencana Syafiie, 2013:117) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005:28) manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Batasan Manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah : Ketatalaksanaan, Manajemen, Management dan Pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu Manajemen mengandung tiga fungsi pengertian :

- a) Manajemen sebagai suatu proses
- b) Manajemen sebagai Kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- c) Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Fungsi-fungsi menejemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya menurut Erni dan Kurniawan (2004:8).



Setiap fungsi manajemen sangat diperlukan untuk mengatur manajemen pada setiap organisasi hingga tercapainya tujuan akhir dari sebuah organisasi. Dari fungsi manajemen tersebut, fungsi penilaian merupakan fungsi akhir manajemen untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan.

## **5. Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategis, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari pada aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Nugroho (2004;54) mendefinisikan kebijakan publik. "Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009;18) kebijakan publik dalam kerangka substansi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik keranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

James Anderson dalam Agustino (2006; 166) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut :

*“serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor yang berhubungan dengan suatu*

*permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan “konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau yang dimaksud, dan hal itulah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada”*

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2004;53) mendefinisikan kebijakan publik “sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu “. (*a projectod program of goald, values and practies*). Selanjutnya David Eatson dalam Nugroho (2004;53) menyebutkan kebijakan publik “sebagai aktifitas pemerintah”. (*the impact government*).

Kebijakan Publik yang dibuat oleh pemerintah provinsi yaitu peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Konsep Keuangan Daerah**

Pada dasarnya berbicara keuangan merupakan subsistem dari sistempenyelenggaraan pemerintahan dalam rangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.

The liang Gie (1981; 341) menyebutkan bahwa sistem merupakan kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan disatupadukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari subsistem-subsistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu.

Dari rumusan tersebut diatas mengarah pada suatu cara yang tepat dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit hendaknya menggunakan suatu pendekatan kesistem (system approach). Pendekatan kesisteman ini lebih tepat karena diharuskan untuk menelaah suatu permasalahan dalam bentuk totalitas.

Dalam sistem keuangan itu sendiri dapat terdiri atas subsistem penggarang, subsistem pembiayaan, subsistem penerima, subsistem penggajian, subsistem pengadaan, dan sebagainya apa yang dilihat sebagai subsistem sangat tergantung dari maksud, tujuan dan sasaran dari pembagian yang dilakukan.

Dari pendekatan wilayah, pemerintah dapat dianggap sebagai sistem sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai subsistem yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam pasal 23 Undang-undang Dasar 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan

subsistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 279 sampai dengan pasal 299 didalam bab XI yang berjudul keuangan daerah.

Sedangkan tujuan utama dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah seperti disebutkan Brian Bander dalam (Nick Devas, 1989,279) adalah tanggung jawab, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan daya guna, serta pengendalian.

Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien memerlukan pengaturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan undang-undang sesuatu yang sangat penting bagi proses pengelolaan keuangan daerah. pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki dan menjamin suatu kondisi yang tertib, pasti dan adil.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat antara pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Hal ini sejalan dengan kesepakatan luhur yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Sementara itu dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kenneth (dalam Nick Devas, 1989; 179) mengemukakan bahwa hubungan keuangan pusat daerah menyangkut pembagian. Hubungan ini menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan ini.

Tujuan utama hubungan ini ialah mencapai perimbangan antara berbagai pembagian ini, bagaimana agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat disesuaikan. Dengan bagian lain Devey (dalam Yusnar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003; 85) juga merinci bahwa tujuan hubungan antara pusat dan daerah adalah :

- a. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat-tingkat pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan panggunanya.
- b. Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber dana yang cukup, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik (penyediaan dana untuk menutup kebutuhan rutin dan pembangunan)
- c. Pembagian yang adil antara pembelajaran daerah yang satu dan daerah lainnya.
- d. Pemerintahan daerah dalam mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan bahan pengeluaran pemerintah.

Pertimbangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah Daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata

cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan.

## 7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

*Empowerment*, yang dalam Bahasa Indonesia berarti “Pemberdayaan” adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dalam kebudayaan Barat. Bertitik tolak, umumnya Eropa. Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah dikenal sejak revolusi industri atau sejak lahirnya Eropa pada abad 18 atau zaman Renaissance, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan determinasi keagamaan.

Menurut Widjaja, (dalam Rahyuni Ra’uf 2015:123) mengenai pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Pendapat Suharto (dalam Rahyuni Ra’uf 2015:142) dalam mendefinisikan pemberdayaan antara lain:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunikasidiarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas kehidupannya).

Pemberdayaan diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Menurut Mubyarto (dalam Azam Awang, 2010: 46), menekankan dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (dipedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dimana masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Tujuan pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat (2007: 176-190), adalah mendirikan masyarakat yang bersangkutan dalam membangun potensi yang ada dengan kemampuan dan kemampuannya untuk memajukan diri sendiri secara bersama kearah kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan masyarakat merupakan kelompok / kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, kurang lebih bersifat tahan lama, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkeseimbangan dalam waktu relatif lama. Masyarakat juga merupakan unsur terpenting dalam pembangunan. Menurut Sumodiningrat (2007: 18) mendefinisikan pembangunan sebagai proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata.

## **8. Konsep Evaluasi**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih

tahu kepada orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya. (Depdikbud, 2002;45) menurut Bryan dan White (1987;15) Evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal ini terjadi, Evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program atau rencana.

Menurut Wibawa dalam Nugroho (2004; 186) Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat fungsi yaitu :

1. *Eksplamasi*, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamati.
2. *Kepatuhan*, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. *Audit*, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *aoutput* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

Menurut Rossi, Freeman dan Wright (dalam Ekowati, (2005;58) mengatakan bahwa secara umum ada empat macam bentuk evaluasi, yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi perencanaan.
2. Evaluasi proses/ program.
3. Evaluasi dampak.
4. Evaluasi terhadap sumber.

Terhadap berbagai model evaluasi, tiga diantaranya menurut Ndraha (2003:201) adalah :



1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah before.
2. Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3. Model kelompok control-kelompok tes (diberi pelaku)

Menurut Syafiie (2003;3-5) Evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai dalam prosesbekerja yang telah dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum,
3. Apakah tugas yang dibeikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberi bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;
5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan kejabatan lain;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;
7. Untuk menfsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Dunn dalam Leo Agustino (2006:163-164) menyatakan ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

1. Evaluasi semu (*formal evaluation*)

Adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang valid dan terpercaya mengenai hasil suatu kebijakan. Asumsi utamanya adalah tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat dan manfaat untuk nilai kebijakan program.

2. Evaluasi keputusan Teoritis (*desicion theoritic evaluation*)

Adalah menggunakan metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai dari pelaku kebijakan.

Uraian diatas dapat diartikan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai rencana atau bahkan sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak atau hasil kebijakan yang terjadi.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dalam produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. (William, 2003:608).

Pengertian diatas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataan mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses adalah evaluasi kerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Dunn (2003;610) berpendapat mengenai kriteria evaluasi dapat dibagi menjadi enam bagian sebagai berikut :

1. Efektifitas berasal dari kata *efektif* yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas juga disebut hasil guna.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
4. Perataan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran.
5. Responsivitas adalah sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran atas penerapan.
6. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

### 9. konsep Efektifitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan dengan baik. Robbins (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.

Menurut Steers (1997), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Dan Sumaryadi (2005:105), mengatakan efektifitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Sadad (2014:41) menyatakan bahwa konsep efektifitas merupakan konsep yang luas mencakup berbagai faktor dan dari sudut pandang mana kita melihatnya. Pada umumnya efektifitas dihubungkan dengan berbagai cara pencapaian tujuan baik dari segi proses ataupun dari segi waktu.

Untuk membuat efektifitas menjadi konkret (dapat diukur) banyak kriteria yang dapat digunakan, namun Steers dalam (2014:43) mengatakan kriteria yang paling banyak dipakai untuk mengukur efektifitas meliputi:

1. pemanfaatan sumberdaya
2. kepuasan kerja
3. kemampuan berlababa
4. kemampuan adaptasi
5. produktifitas kerja.

Subekhi dan Jauhar (2013;247) berpendapat bahwa efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Berarti efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dari beberapa definsi efektifitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan bentuk membandingkan pekerjaan yang sudah dirumuskan atau dipola dengan hasil yang telah dicapai. Apakah hasil capaian dalam dalam bekerja didalam organisasi mampu mendekati atau menyeimbangi rumusan pekerjaan yang sudah disepakati bersama, membandingkan ini akan bermanfaat kepada minimalisir kesalahan atau penyimpanan kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam bekerja.

## **10. Konsep Pembangunan**

Menurut Talizuduha Ndraha (2011: 134) pembangunan pemerintah adalah pembangunan kemampuan pemerintah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layan civil.

Menurut Coralie Bryant dan Louise white (dalam taliziduhu Ndraha, 1990;15-16) pembangunan adalah upaya yang meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya ada lima implikasi utama definisi tersebut.

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equality*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang bersama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti mengurangi pembangkitan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Selanjutnya Kortern dan Corner (dalam Hikmat,2001;96) mengatakan konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. lebih lanjut kortern dan corner (dalam Hikmat,2001;96) mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu sebagai berikut :

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian rumah tangga miskin.
3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber lokal.

Pendapat Todaro (1998:66) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dan kehidupan masnuai. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah

pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan social. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Todaro (1998:40) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi Negara yang sedang berkembang.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian berikut ini :

**Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Abdul Rohman (2016). Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau	Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni DiKecamatan Pusako Kabupaten Siak	1. sama-sama menggunakan indikator oleh William N Dunn, tetapi beda konsep	1. lokasi Penelitian, instansi nya juga berbeda. 2. memakai konsep Evaluasi Nugroho (2004)
2	Lawuning Nastiti (2016) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang	Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014	1. sama-sama menggunakan metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. 2. sama-sama	1. perbedaannya terletak pada lokasi penelitian

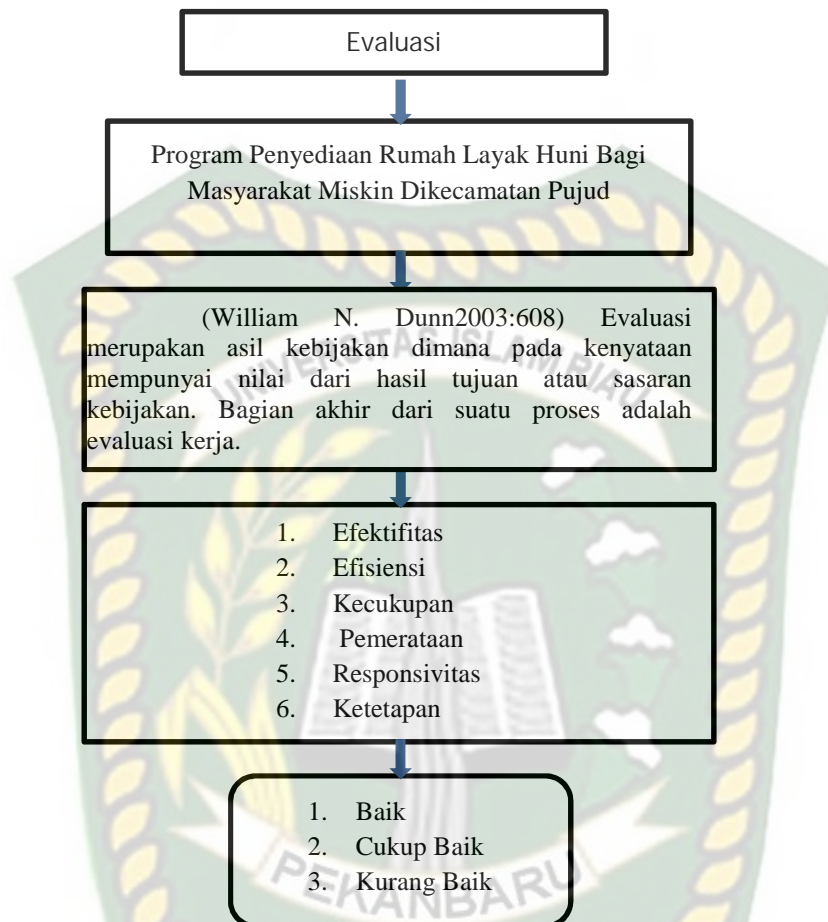
1	2	3	4	5
			memakai konsep pembangunan	
3	Muhammad Irfan (2016) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,	Pekanbaru Dalam Mengatasi Kemiskinan Tahun 2016	1. sama-sama menggunakan Teori kebijakan	1. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif saja

*Sumber : Data olahan 2018*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu itu ada beberapa perbedaan diantaranya penelitian ini membahas lebih dalam mengenai Program Rumah Sehat Layak Huni ditingkat provinsi disertai dengan pendanaan, kriteria dan SOP nya, dipenelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang daerah yang mendapatkan dan peneliti terdahulu Mengkaji Program Rumah Layak Huni ditingkat kabupaten.

### **C. Kerangka Pikiran**

Kerangka pikiran tentang evaluasi pelaksanaan program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni dikecamatan Pujud, kabupaten Rokan Hilir.

**Gambar II.1 : Kerangka Pikir****D. Konsep Operasional**

Untuk mempermudah dalam menganalisa penelitian dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap narasi penelitian, maka penulis perlu mengoperasikan variabel-variabel yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja kebijakan suatu kebijakan, Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.



2. Pelaksanaan program dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program bantuan rumah sehat layak huni Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Tahun 2018 Salah Satunya Kepenghuluan Tahun 2018 pelaksanaan segala sesuatu yang dilakukan dengan harapan bisa membuat masyarakat lebih sejahtera.
3. Persiapan dalam penelitian ini adalah kegiatan persiapan dalam program Bantuan Rumah Layak Huni.
4. Efektifitas adalah bentuk membandingkan pekerjaan yang sudah dirumuskan atau dipola dengan hasil yang telah dicapai. Apakah hasil capaian dalam dalam bekerja didalam organisasi mampu mendekati atau menyeimbangi rumusan pekerjaan yang sudah disepakati bersama, membandingkan ini akan bermanfaat kepada minimalisir kesalahan atau penyimpanan kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam bekerja. Kesesuaian pencapaian tujuan Program bantuan rumah sehat layak huni dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.
5. Kecukupan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. sejauh mana telah dicapai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dari program bantuan Rumah Sehat Layak Huni Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Tahun 2018 Salah Satunya Kepenghuluan Tahun 2018
6. Pemerataan adalah membuat pembangunan secara merata terhadap masyarakat miskin dari program bantuan Rumah Sehat Layak Huni

Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Tahun 2018 Salah Satunya Kepenghuluan.

7. Responsivitas adalah respon atau tanggapan dari penerima program bantuan Rumah Layak Huni Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Tahun 2018 Salah Satunya Kepenghuluan Tahun 2018.
8. Ketetapan adalah Nilai atau Harga dari tujuan program bantuan Rumah Layak Huni Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Tahun 2018 Salah Satunya Kepenghuluan Tahun 2018.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2. Operasional Variabel tentang Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.**

Kosep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penelitian 4	Ukuran 5
(William N. Dunn 2003:60) Evaluasi merupakan hasil kebijakan merupakan hasil Kebijakan dimana pada kenyataan mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses	Evaluasi Program penyediaanBantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 2018	1.Efektifitas	1. Penyediaan Rumah untuk orang Miskin.	Baik
		2.Kecukupan	2.Rumah yang disediakan sesuai standar operasional.	Cukup baik
			3. Rumah yang disediakan harus sesuai dengan kualitas bangunan.	Kurang baik
		1. Rumah yang disediakan untuk yang berhak menerimanya.	Baik	
			2. Rumah yang disediakan harus	Cukup baik

1	2	3	4	5
adalah evaluasi kerja.			<p>dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur.</p> <p>3. Rumah yang disediakan harus dihuni oleh pemiliknya atau yang menerimanya.</p>	Cukup Baik
<p>Dokumen ini adalah Arsip Miik :</p> <p>Perpustakaan Universitas Islam Riau</p>		3.Pemerataan	<p>1. Rumah yang disediakan harus diperuntukkan bagi yang berhak saja.</p> <p>2. penetapan rumah yang disediakan sesuai dengan lokasi yang berhak.</p> <p>3. Rumah yang disediakan harus dihuni Oleh pemiliknya atau penerimanya</p>	Baik
		4.Responsivitas	<p>1. Tidak terjadi penolakan terhadap program rumah layak huni.</p> <p>2. masyarakat nyaman tinggal dirumah tersebut.</p>	Cukup Baik

1	2	3	4	5
		5. Ketetapan	3. Masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi . 1. Rumah jadi hak milik masyarakat. 2. Rumah menjadi tanggung jawab masyarakat. 3. Rumah lepas dari tanggung jawab pemerintah	Kurang Baik  Baik  Cukup baik  Kurang baik

Sumber : modifikasi penelitian,2018

#### F. Teknik pengukuran

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka dalam pengukuran variabel evaluasi program bantuan rumah layak huni dikepenghuluan pujud kabupaten Rokan Hilir diukur dengan menggunakan ukuran berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil terhadap seluruh indikator yang ada.

Untuk pengukuran terhadap variabel evaluasi program Bantuan Rumah Layak Huni DiKepenghuluan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

**Baik** : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase >67-100%

**Cukup baik** : apabila 2 dari 4 indikator variabel berada pada kategori baik tanggapan responden berada pada persentase 34-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada persentase  $>34\%$

Selanjutnya untuk melakukan pengukuran terhadap setiap indikator maka dapat dilihat seperti dibawah ini:

### 1. Efektifitas

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase  $>67-100\%$

Cukup baik : apabila 2 dari 4 indikator variabel berada pada kategori baik tanggapan responden berada pada persentase 34-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada persentase  $>34\%$

### 2. Kecukupan

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase  $>67-100\%$

Cukup baik : apabila 2 dari 4 indikator variabel berada pada kategori baik tanggapan responden berada pada persentase 34-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada persentase  $>34\%$

### 3. Pemerataan

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase  $>67-100\%$

Cukup baik : apabila 2 dari 4 indikator variabel berada pada kategori baik tanggapan responden berada pada persentase 34-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada persentase  $>34\%$

### 4. Responsivitas

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase  $>67-100\%$

Cukup baik : apabila 2 dari 4 indikator variabel berada pada kategori baik tanggapan responden berada pada persentase 34-66%.

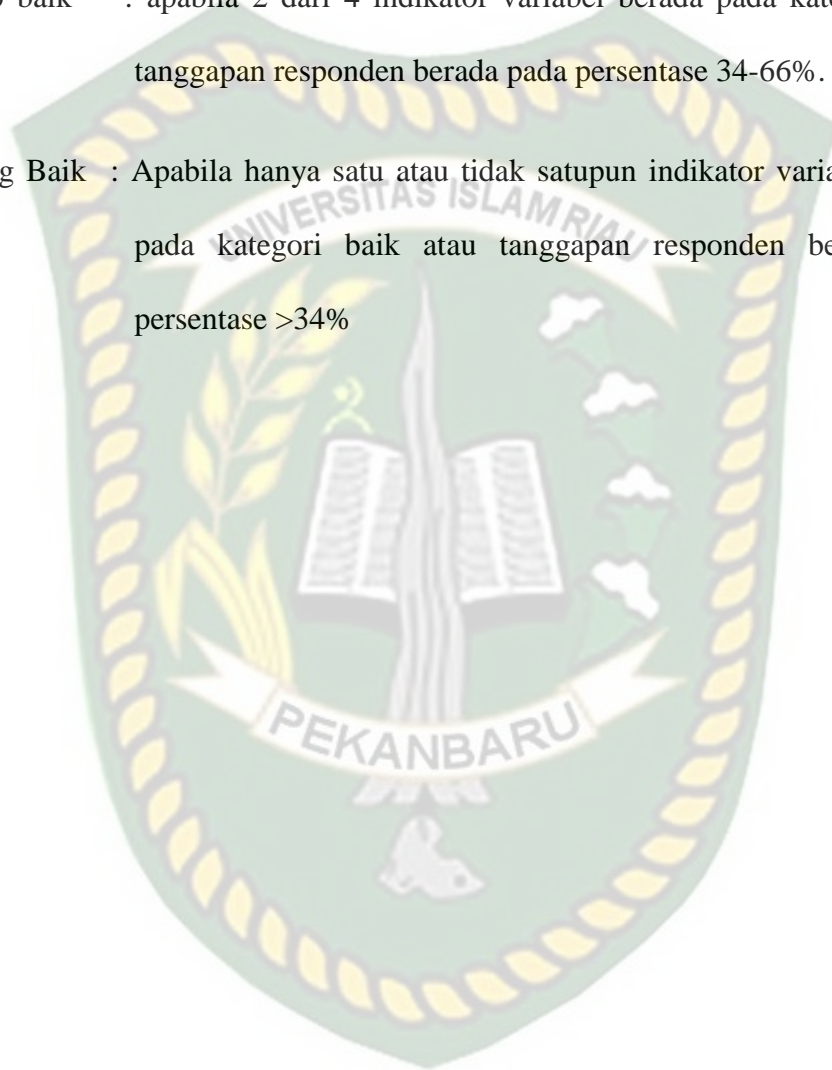
Kurang Baik : Apabila hanya satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada persentase  $>34\%$

### 5. Ketetapan

**Baik** : Apabila seluruh indikator variabel berada pada kategori baik untuk tanggapan responden berada pada persentase >67-100%

**Cukup baik** : apabila 2 dari 4 indikator variabel berada pada kategori baik tanggapan responden berada pada persentase 34-66%.

**Kurang Baik** : Apabila hanya satu atau tidak satupun indikator variabel berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada persentase >34%



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe dalam penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung mengambil informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian keobjek yang akan diteliti berdasarkan pengamatan, baik berupa data dalam bentuk dokumen, jawaban responden maupun observasi sehingga diperoleh hasil evaluasi terhadap masalah penelitian ini. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata atau narasi dan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan.

Sugiyono (2009:15), mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Dan pendapat Sugiyono (2013 : 14) selanjutnya mengenai Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.



Alasan peneliti menggunakan metode campuran pada penelitian ini adalah untuk memperjelas penelitiannya secara ri 52 rena penelitian ini memakai penelitian menggunakan skala likart digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator dan wawancara yang digunakan sebagai alat untuk memperjelas dari data kuisisioner yang didapatkan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Pujud kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat miskin/kurang mampu yang membutuhkan Rumah Layak Huni. Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya tidak lepas dari berbagai alasan yaitu ingin mengetahui seberapa jauh mengenai pelaksanaan Program Rumah Sehat Layak Huni yang telah dijalankan oleh Kecamatan Pujud, serta alasan-alasan mengapa ada dikepenghuluan-kepenghuluan tidak mau mengajukan masyarakatnya, lokasi mudah dijangkau dan ekonomis.

### **C. Populasi Sampel**

#### 1. Populasi

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian, Effendy (2010;101).

#### 2. Sampel

Sampel adalah suatu yang digunakan untuk menunjukkan fisik suatu kelompok yang lebih besar, bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan, Effendy (2010;101).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan provinsi Riau, Camat Pujud, Penghulu Pujud, Masyarakat yang menerima Rumah Layak Huni, dan Masyarakat yang tidak mendapatkan Rumah Layak Huni.

**Tabel III.1. Jumlah Populasi dan Sampel Tentang Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan provinsi Riau	1	1	100 %
2	Camat Pujud	1	1	100 %
3	Penghulu Pujud	1	1	100 %
4	Masyarakat yang memperoleh bantuan RSLH	12	12	100 %
5	Masyarakat yang tidak memperoleh bantuan RSLH	8	8	100 %
Jumlah		23	23	100 %

Sumber : data olahan 2018

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam melakukan penarikan sampel untuk pegawai pengawasan Daerah, Camat, Kepala Desa dan Masyarakat Miskin yang menerima Bantuan Rumah Layak Huni dan Masyarakat Yang tidak Mendapatkan Rumah Layak Huni dengan cara tidak melakukan *sensus sampling* semua dijadikan populasi dan dijadikan sample.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data dalam penelitian tentang evaluasi program penyediaan rumah layak huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir 2018.

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa keterangan-keterangan yang diberikan oleh informan :

- a. Identitas Informan
- b. Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.
- c. Hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan program bantuan rumah layak huni.

##### **2. Data Skunder**

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari informan melainkan diperoleh dari dokumen, buku-buku hasil penelitian lainnya yang berkenaan dalam penelitian ini. Untuk data skunder, data yang dicari adalah data tentang gambaran umum lokasi penelitian, yakni data tentang Kecamatan Pujud.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kuisisioner, menurut Suyanto dan Sutinah (2011 ; 60) Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah tersedia sehingga responden tinggal memilih sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadi.
- b. Wawancara, Harrison (2007 ; 104) menyatakan definisi wawancara itu adalah pertemuan antara periset dan responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topik riset.
- c. Observasi, menurut Usman (2009:52), mengenai Observasi itu apa adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.
- d. Studi Dokumentasi, Ridwan (2003:58), mengatakan mengenai Studi Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian. Studi Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku.

## G. Teknik Analisi Data

Singarimbun dan Effendi,(1995;263), mengatakan mengenai Analisi data itu adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami.

Sugiyono (2013), mengatakan mengenai penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode kuantitatif secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan tabel dan uraian kemudian dianalisiskemudian diambil kesimpulan.teknik analisis data penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan kata numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan tingkat skala pengukuran.
2. Sebaran data numerik ini dianalisis berdasarkan bobot dan nilai responden.
3. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert, digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.

$$\text{Rumus Skala Likert} : \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$$

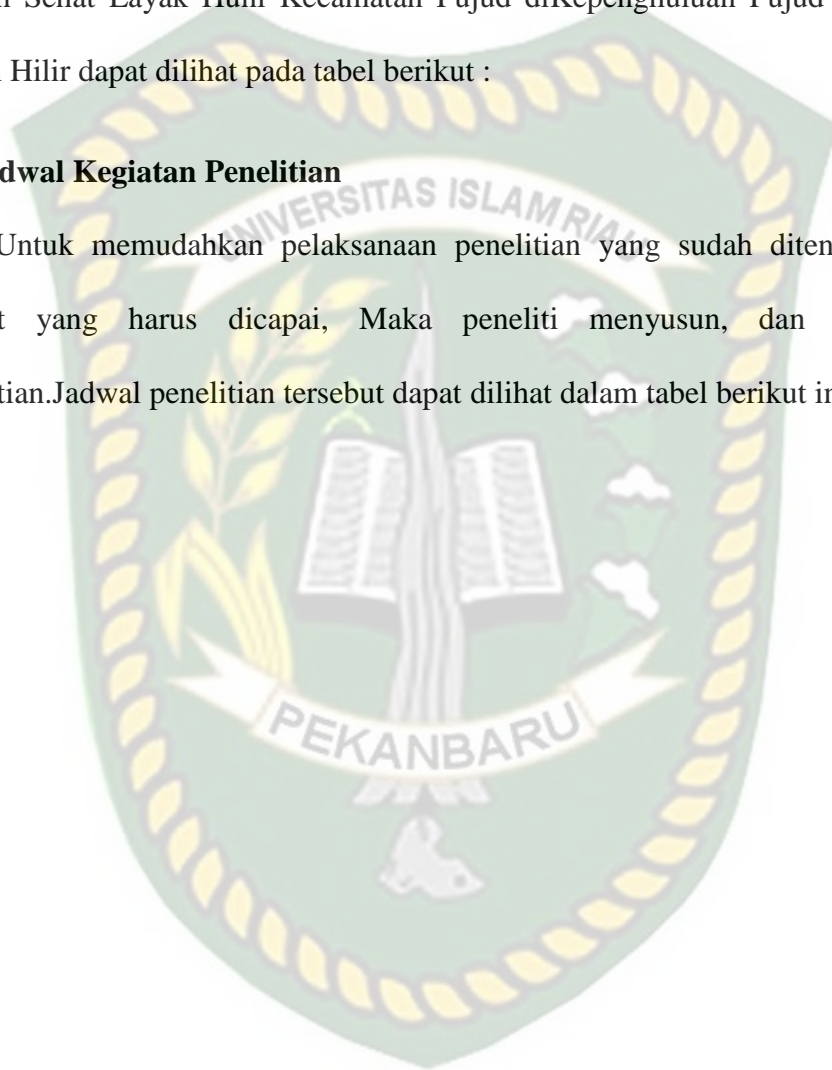
4. Ukuran persepsi dianalisis berdasarkan rentng pengukuran yang dirumuskan.
5. Hasil persepsi dianalisis dari setiap indikator diRekapitulasi dan ditarik persentase dari satu variabel pelaksanaan.
6. Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penilaian yang telah dirumuskan

## H. Jadwal Waktu Penulis

Adapun jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Program penyediaan Rumah Sehat Layak Huni Kecamatan Pujud diKepenghuluan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

## I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian yang sudah ditentukan atau tempat yang harus dicapai, Maka peneliti menyusun, dan melakukan penelitian. Jadwal penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



**Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang “Evaluasi Program penyediaan Bantuan Rumah Sehat Layak Huni di Kecamatan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018”**

No	jenis kegiatan	Tahun 2019											
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
1	Persiapan dan Penyusunan Up	■											
<b>Tahun 2020</b>													
2	seminar up	■											
3	Riset	■											
4	Penelitian Lapangan			■									
5	Pengelolaan dan analisis Data				■								
6	konsultasi dan Bimbingan Skripsi					■							
7	ujian skripsi						■						
8	revisi dan Pengesahan Skripsi							■					
9	Penyerahan								■				

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis dan Demografis

Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Sumatra. yaitu disepanjang pesisir selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil seperti pulau utamanya itu pulau Batam dan pulau Bintan yang terletak disebelah timur Sumatra dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar lainnya antara lain kota Dumai, Selatpanjang, Bagansiapi-api, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat.

Provinsi Riau memiliki beberapa kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Bengkalis;
2. Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Kabupaten Kampar;
5. Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Kabupaten Pelalawan;
8. **Kabupaten Rokan Hilir;**
9. Kabupaten Rokan Hulu;
10. Kabupaten Siak;
11. Kota Dumai;
12. Kota Pekanbaru.

Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu lokasi penelitian ini dan

Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bangko;
2. Kecamatan Kubu;
3. Kecamatan Tanah Putih;



4. Kecamatan Rimba Melintang;
5. Kecamatan Bagan Sinembah;
6. Kecamatan Pasir Limau Kapas;
7. Kecamatan Sinoboi;
8. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- 9. Kecamatan Pujud;**
10. Kecamatan Bangko Pusako;
11. Kecamatan Simpang Kanan;
12. Kecamatan Batu Kmpar;
13. Kecamatan Rantau Kopar;
14. Kecamatan Pekaitan;
15. Kecamatan Kubu Babusalam;
16. Kecamatan Balai Jaya;
17. Kecamatan Bagan Sinembah Raya;
18. Kecamatan Tanjung Medan.

Kecamatan Pujud merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten rokan hilir provinsi riau.berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, Kecamatan Pujud dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Pujud dan Kecamatan Tanjung Medan, dan hasil dari Kecamatan Pujud itu ada Kepenghuluan pujud dan beberapa kepenghuluan lainnya, Kepenghuluan Pujud melakukan pemekaran dan hasilnya adalah Kelurahan Pujud, Kelurahan Pujud Selatan, Kelurahan Pujud Utara dan Pematang Genting.

Luas Wilayah pada Kecamatan Pujud ini ialah kurang lebih 119,00 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pujud terdiri dari satu kelurahan dan 15 kepenghuluan.Kecamatan Pujud berdasarkan statistik tahun 2018 diwilayah Kecamatan pujud memiliki penduduk sebanyak 2.864 jiwa yang terdiri dari perempuan 1.415 jiwa dan laki-laki sebanyak 1.449 jiwa.

**B. Keadaan Pegawai berdasarkan Jumlah pegawai, jenis kelamin pegawai, pengembangan karir pegawai, masa kerja pegawai kantor camat pujud.**

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam suatu organisasi bisa berbeda jumlahnya hal ini ditentukan oleh banyaknya jumlah laki-laki dan perempuan yang ada disebuah organisasi tersebut.

Pegawai kantor camat pujud sangat mendukung kerja ada maka selanjutnya dapat dilihat jumlah pengawainya ditabel berikut ini:

**Tabel IV.1 Keadaan pegawai kantor camat pujud menurut jumlah pegawai.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	14	78%
2	Perempuan	4	22%
	<b>Total Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : Kantor Camat Pujud, 2019.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai dikantor camat pujud yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang, diantara pegawai laki-laki yang berjumlah 14 orang tersebut juga ada yang dikategorikan pegawai yang sudah senior (tua) atau bisa dikatakan yang telah lama mengabdikan dikantor camat pujud tersebut. Dan untuk pegawai wanitanya berjumlah 4 orang, berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Kolaborasi antara pegawai senior dengan pegawai junior demikian sangat berarti dalam menjalankan tugas-tugas dikantor camat pujud sehingga dapat bekerja dengan baik dan lebih maksimal lagi, maka dari itu dengan jumlah laki-laki yang dominan dalam organisasi maka setiap tugas dapat dijalankan secara baik dan optimal.

## 2. Masa Kerja

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukan maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Kantor Camat Pujud berdasarkan pengamatan karir dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel IV.2 : Keadaan pegawai kantor Camat Pujud menurut pengembangan karir.**

No	Tingkat Pengembangan Karir	Jumlah	persentase
1	SMA	11	61%
2	Sarjana Muda	1	5%
3	Sarjana	6	33%
	<b>Total Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : kantor Camat Pujud*

Dari data tabel diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat pengembangan karir yang paling banyak adalah tingkat SMA berjumlah 11 orang maka untuk itu setiap pekerjaan yang dilakukan harus dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan dapat diselesaikan dengan sempurna.

### 3. Pangkat

Untuk masa kerja pada setiap pegawai sangat mendukung hasil karya yang dilakukan maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel IV.3 : Keadaan Pegawai Kantor Camat Pujud menurut pangkat.**

No	Pangkat / Golongan	Jumlah	Persentase
1	SMP	-	-
2	SMA	11	61%
3	Sarjana	7	39%
	<b>Total Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

*Sumber data : Kantor Camat Pujud*

Dapat dilihat dari tabel IV.3 diatas diketahui bahwa pegawai kantor camat pujud yang memiliki golongan sebagian pegawai mempunyai pangkat IIb dan IIc dan sebagian pegawai mempunyai pangkat IIIc dan IIIId, dan ada Iva dan Ivb. atau pada umumnya tergolong pegawai baru, akan tetapi kinerja para pegawai kantor camat pujud harusnya dapat semakin membaik karena masa masa kerja pegawai juga sudah membaik.

#### 4. Umur

Umur setiap pegawai sangatlah mendukung kesabaran untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan usia pegawai dari kantor camat pujud berkisar diantara tiga puluh (30) tahun keatas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel IV.4 Umur dari Pegawai Kantor Camat Pujud.**

No	Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	20-25	-	-
2	25-30	-	-
3	30-35	5	28%
4	36-40	2	11%
5	41-50	8	44%
6	46-50	2	11%
7	51-58	1	5%
Total Jumlah		<b>18</b>	<b>100%</b>

*Sumber kantor camat pujud 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa umur dari pegawai dikantor camat pujud sebagaimana besar adalah antara 30 Tahun keatas hingga 40 Tahun keatas hal ini menandakan pegawai pada masa produktif untuk bekerja.

### C. Tugas dan Fungsi Kantor Camat Pujud

#### 1. Susunan Organisasi Kecamatan

a. Camat

Mempunyai Tugas :

- 1) Mengatur kegiatan pemberdayaan masyarakatnya;
- 2) Mengatur upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengatur penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengatur pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengatur penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
- 6) Membimbing dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan kelurahan;
- 7) Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kepenghuluan atau kelurahan.

b. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan dan merumuskan pengendalian perencanaan dan evaluasi pelaksanaannya;
- 2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- 3) Melaksanakan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan administrasi kepegawaian;

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintah umum dan kelurahan;
- 2) Melaksanakan penyusunan pembinaan catatan sipil dan administrasi kependudukan;
- 3) Melaksanakan penyusunan kegiatan dalam bidang sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

- 2) Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja.

e. Seksi Pembangunan Masyarakat

Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan dalam perekonomian dan distribusi
- 2) Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan dalam pembangunan,
- 3) Melaksanakan penyusunan kegiatan dalam bidang sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pembinaan peran wanita dan olah raga;
- 2) Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan penyusunan program, pengembangan karir, kebudayaan dan kesehatan masyarakat,serta kehidupan keagamaan.

g. Seksi Pelayanan Umum

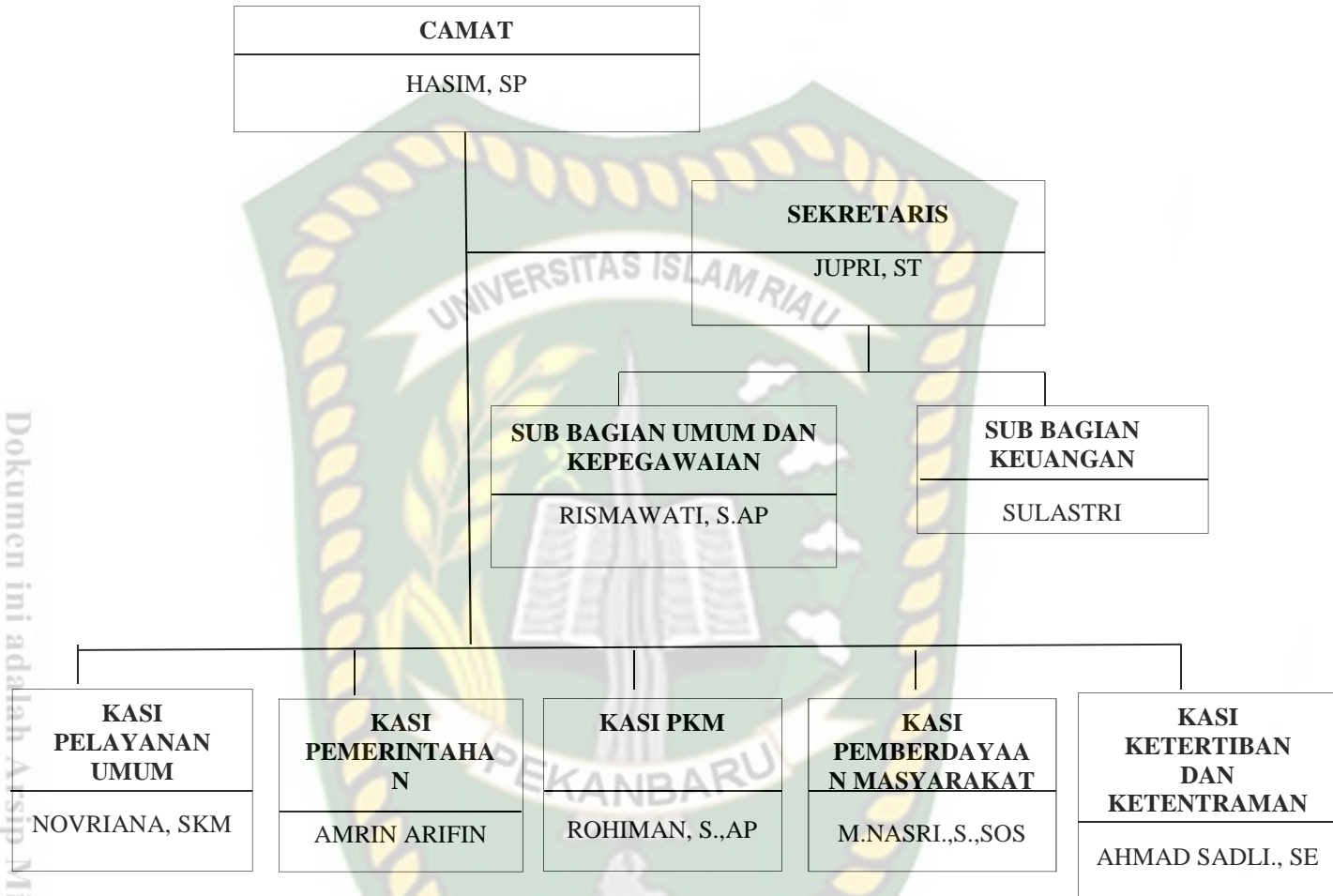
Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan investasi;
- 2) Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pembinaan pelayanan sarana dan prasarana.

**D. Struktur Organisasi kecamatan pujud Kabupaten rokan Hilir**

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan kantor camat pujud dapat kita lihat pada struktrur dibawah ini

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan hilir**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari Kepala Dinas, camat, penghulu maupun masyarakat yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Data tersebut diperoleh dari kuisioner yang telah disebarkan sebanyak 23 orang.

Hasil kuisioner diperoleh dari sejumlah data yang diperlukan, meliputi data identitas responden dan tanggapan responden tentang

#### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Responden penelitian ini adalah Kepala Dinas, camat, penghulu Pujud beserta masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

##### 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin pada lokasi penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat jenis kelamin responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel V.1 Jenis Kelamin Responden Penelitian**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	15	65%
2.	Perempuan	8	35%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih dominan dari pada perempuan, dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 15 orang atau 65% sedangkan responden perempuan berjumlah 8 orang atau 35%.

## 2. Unsur Responden

Usia merupakan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal dibandingkan yang usia lebih tua, terkadang terkendala dengan umur yang sudah tergolong usia muda yaitu kurang dari 45 tahun dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu memberikan pengaruhnya dalam bentuk peranannya, sedangkan responden yang masih tergolong usia tua yaitu 45 tahun akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.2 Umur Responden Berdasarkan Usia Termuda dan Usia Tertua**

No	Usia	Responden	Persentase
1.	20-25	-	-
2.	26-30	-	-
3.	31-35	2	9%
4.	36-40	2	9%
5.	41-45	4	17%
6.	46-50	2	9%
7.	50 Keatas	13	56%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat umur responden dalam penelitian ini paling banyak adalah 50 Keatas sebanyak 13 orang atau 56% dan 41-45 sebanyak 4 oarang atau 17% sedangkan umur 31-35 , 36-40 dan 46-50 sebanyak 2 orang atau 9%.

### 3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang akan diberikan oleh responden, semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang diberikan oleh penelitian dalam kuisisioner penelitian. Dari hasil penelitian tentang diperlukan, meliputi data identitas responden dan tanggapan responden tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 serta penyebaran kuisisioner maka identitas rsponden penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan yang tertera pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Responden Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	19	83%
2.	SMP	2	9%
3.	SMA	-	-
4.	D3	-	-
5.	S1	2	9%
6.	S2	1	4%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak tamatan SD yaitu sebanyak 19 orang dengan persentase 83%, sedangkan tingkat pendidikan responden paling sedikit yaitu S2 yaitu sebanyak 1 orang dengan persentase 4%, sedangkan untuk tamatan S1, SMP sebanyak 2 orang dengan persentase 9% dan untuk tamatan D3 dan SMA Tidak ada.

#### **B. Hasil Penelitian Tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.**

Dalam sebuah organisasi khususnya publik, tentunya memiliki aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan menyangkut segala kepentingan publik, peraturan-peraturan tersebut penting dalam tertib administrasi dalam suatu kesatuan organisasi mengenai bagaimana suatu organisasi dapat mengelola sumber daya organisasi dengan menggunakan manajemen serta metode-metode apa saja yang digunakan untuk mencari tujuan yang ditentukan.

Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud terlihat dari lima (5) indikator yaitu Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketetapan. Untuk lebih jelasnya penelitian akan memaparkan setiap indikator sebagai berikut :

##### **1. Indikator Efektifitas**

Efektifitas merupakan bentuk membandingkan pekerjaan yang sudah dirumuskan atau dipola dengan hasil yang telah dicapai. Apakah hasil capaian dalam dalam bekerja didalam organisasi mampu mendekati atau menyeimbangi rumusan pekerjaan yang sudah disepakati bersama, membandingkan ini akan bermanfaat kepada minimalisir kesalahan atau penyimpanan kerja yang dilakukan

oleh sumber daya manusia dalam bekerja. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator efektifitas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.4 : Penilaian Responden Unsur Kepala Dinas, camat dan penghulu Tentang Indikator Efektifitas Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Penyediaan Rumah untuk oran Miskin	1	2	0	3
2.	Rumah yang di sediakan sesuai standar operasional	1	1	1	3
3.	Rumah yang disediakan harus sesuai dengan kualitas bangunan	0	3	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>33%</b>	<b>67%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 3 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 2 orang dan yang menjawab kurang baik 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 1 orang dan jawaban kurang baik 1 orang . selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 0 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 3 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Efektifitas sebanyak 2 orang dengan rata-rata 1 dengan persentase 33%.

Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator efektifitas sebanyak 6 dengan rata-rata 2 dengan persentase 67% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator efektifitas sebanyak 1 dengan rata-rata 0 dengan persentase 0%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas, Camat dan Penghulu indikator efektifitas bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Sehat Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan pada Tanggal 7 Juli 2020, penelitian mengajukan pertanyaan : Bagaimana Menurut Bapak dalam pekerjaan pembangunan terkait rumah layak huni di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ini ?

Ia mengatakan bahwa :

*“Selama yang saya lihat berdasarkan laporan itu menurut saya sudah cukup baik karna mereka telah mendapat tempat yang layak sehingga masyarakat menjadi aman untuk tinggal dirumahnya tersebut”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak pemerintah memfasilitasi pembangunan rumah layak huni, apakah sudah sesuai dengan prosedur dalam pembuatannya ?

Ia mengatakan bahwa :

“Untuk fasilitas dan prosedurnya kami telah memberikan apa yang masyarakat butuhkan seperti aliran listrik, kamar mandi, tempat pembuangan sampah dan aliran air” .

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan terkait prosedur. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari wawancara, dan obsevasi tersebut dan berdasarkan tabel V.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dinilai Cukup Baik dengan persentase 67% dari jumlah responden yang berjumlah 3 orang.

**Tabel V.5: Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Efektifitas Pada Penelitian Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Penyediaan Rumah untuk orang Miskin	7	8	5	20
2.	Rumah yang disediakan sesuai standar operasional	5	5	10	20
3.	Rumah yang disediakan harus sesuai dengan kualitas bangunan	3	11	6	20
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>25%</b>	<b>40%</b>	<b>35%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 7 orang, cukup

baik sebanyak 8 orang dan yang menjawab kurang baik 5 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 5 orang dan jawaban kurang baik 10 orang . selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang menjawab baik sebanyak 3 orang, yang menjawab cukup baik sebanyak 11 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 6 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator efektifitas sebanyak 15 orang dengan rata-rata 5 dengan persentase 25%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator efektifitas sebanyak 24 dengan rata-rata 8 dengan persentase 40% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator efektifitas sebanyak 21 dengan rata-rata 7 dengan persentase 35%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Masyarakat indikator efektifitas bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”** Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Pujud pada Tanggal 18 Mei 2020, penelitian mengajukan pertanyaan :

Bagaimana menurut bapak Atan yang menerima Rumah Sehat Layak Huni mengenai rumah layak huni tersebut?

Ia mengatakan bahwa :

*“Yang saya ketahui bahwa ruma layak huni adalah rumah yang tidak layak untuk ditinggal itu di perbaiki sehingga menjadi layak dihuni masyarakat”*

Sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yang tidak mendapatkan Rumah Sehat Layak Huni yang bernama Boiman di kediamannya :

Menurut bapak bagaimana dengan rumah yang disediakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan standar operasional ?

Ia mengatakan bahwa :

*“yang saya lihat ini cukup baik karna masih ada rumah yang seharusnya diperbaiki agar menjadi layak huni rumah itu pula yang tidak mendapatkannya, tetapi karena satu alasan juga kenapa tidak mendapatkannya bukan tanpa sebab”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan minimnya pengetahun terkiat prosedur kegiatan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Program Penyediaan Rumah Sehat Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dinilai Cukup Baik dengan persentase 40% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

## **2. Indikator Kecukupan**

Yang dimaksud yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat. Setelah dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengelolaan data maka didapatkan jawaban responden



mengenai indikator Kecukupan, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.6 : Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghulu Tentang Indikator Kecukupan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Rumah yang disediakan untuk yang berhak menerimanya	0	0	3	3
2.	Rumah yang disediakan harus dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur.	1	2	0	3
3.	Rumah yang disediakan harus dihuni oleh pemiliknya atau yang menerimanya	1	2	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 3 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 0 orang, cukup baik sebanyak 0 orang dan yang menjawab kurang baik 3 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 2 orang dan yang menjawab kurang baik 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 1 orang, cukup baik 2 orang dan kurang baik sebanyak 0 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Kecukupan

sebanyak 2 dengan rata-rata 1 dengan persentase 33%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Kecukupan sebanyak 4 dengan rata-rata 1 dengan persentase 33%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator Kecukupan Sebanyak 3 dengan rata-rata 1 dengan persentase 33%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator kecukupan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dengan Penghulu pada tanggal 18 Mei 2020, peneliti mengajukan pertanyaan, Bagaimana manakah Pembuatan Rumah Sehat layak huni dalam pembuatannya apakah ada kendala dilamnya ?

Ia menjawab :

*“sejauh ini saya melihat ada beberapa kendala salah satunya selisih harga dalam pembelian bahan-bahan untuk pembangunan dan ada beberapa lokasi yang sulit dijangkau”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan, bagaimana dalam menjangkau lokasi yang sulit dijalankan dalam pembangunan rumah Sehat layak huni ?

Ia menjawab bahwa :

*“Dalam hal ini adanya kesepakatan antara pihak Dinas Perumahan, kawasan pemukiman dan Pertanahan di Provinsi Riau dengan masyarakat yang memiliki lokasi tersebut”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan minimnya pengetahuan terkiat prosedur kegiatan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dinilai Cukup Baik dengan persentase 33% dari jumlah responden yang berjumlah 3 orang.

**Tabel V.7 : Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Kecukupan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Rumah yang disediakan untuk yang berhak menerimanya	1	9	10	20
2.	Rumah yang disediakan harus dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur.	6	10	4	20
3.	Rumah yang disediakan harus dihuni oleh pemiliknya atau yang menerimanya	4	12	4	20
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Data tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik sebanyak 9 orang dan yang menjawab kurang baik 10 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 6 orang, cukup baik sebanyak 10 orang dan yang menjawab kurang baik 4 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yang memberikan tanggapan baik 4 orang, cukup baik 12 orang dan kurang baik sebanyak 4 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator kecukupan sebanyak 11 dengan rata-rata 4 dengan persentase 20%. Sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator kecukupan sebanyak 31 dengan rata-rata 10 dengan persentase 50%. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang baik terhadap indikator transparansi Sebanyak 18 dengan rata-rata 6 dengan persentase 30%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator kecukupan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang mendapatkan Rumah Sehat Layak Huni yang bernama Bapak saripudin pada tanggal 19 Mei 2020,peneliti mengajukan pertanyaan, apakah Rumah Sehat Layak huni sudah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimnaya ?

Ia menjawab bahwa :

*“menurut saya dengan berdasarkan yang saya lihat sudah diserahkan kepada orang yang tepat namun ada juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan namun karna masyarakat tersebut tidak memiliki lahan tempat tinggal”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan, Apakah rumah yang disediakan telah dilengkapi dengan fasilitas berdasarkan prosedur ?

Ia Menjawab bahwa :

*“Sejauh ini sudah cukup baik dalam pemberian fasilitas ”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan terkait prosedur Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

### **3. Indikator Pemerataan**

Pemerataan adalah membuat pembangunan secara merata terhadap masyarakat miskin dari program bantuan rumah sehat layak huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir. setelah dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan aerta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Pemeratan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.8 : Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghulu Tentang Indikator Pemerataan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Rumah yang disediakan harus diperuntukkan bagi	2	1	0	3
1	2	3	4	5	6
	yang berhak saja				
2.	penetapan rumah yang disediakan sesuai dengan lokasi yang berhak.	0	3	0	3
3.	Rumah yang disediakan harus dihuni Oleh pemiliknya atau penerimanya	0	3	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>33%</b>	<b>67%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 3 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, cukup baik sebanyak 1 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 0, cukup baik 3 orang dan yang menjawab kurang baik 0 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 0 orang, cukup baik 3 orang dan kurang baik sebanyak 0 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator pemerataan sebanyak 2 dengan

rata-rata 1 dengan persentase 33% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator pemerataan sebanyak 7 dengan rata-rata 2 dengan persentase 67% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator pemerataan sebanyak 0 dengan rata-rata 0 persentase 0%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator pemerataan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu pada tanggal 18 Mei 2020, penelitian mengajukan pertanyaan : apakah ada masyarakat yang tidak berhak memperoleh rumah layak huni ?

Ia mengatakan bahwa :

*“setau saya tidak ada malah disini rumah layak huni itu tersalurkan kepada masyarakat yang berhak karna adanya survey untuk melihat apakah masyarakat tersebut berhak memperoleh rumah layak huni tersebut”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Bagaimanakah cara penempatan lokasi rumah layak huni yang berhak mendapatkan bantuan ?

Ia mengatakan bahwa :

*“untuk penempatan tersebut biasanya para petugas melakukan survey lapangan berdasarkan data yang diberikan oleh desa”*

**Tabel V.9 : Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Indikator Pemerataan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Rumah yang disediakan harus diperuntukkan bagi Yang berhak saja	5	7	8	20
2.	penetapan rumah yang disediakan sesuai dengan lokasi yang berhak.	4	13	3	20
3	Rumah yang disediakan harus dihuni Oleh pemiliknya atau penerimanya	5	11	4	20
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>25%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik sebanyak 7 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 8 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang, cukup baik 13 orang dan yang menjawab kurang baik 3 orang. Untuk pertanyaan ketiga responden yang memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik 11 orang dan kurang baik sebanyak 4 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator pemerataan sebanyak 14 dengan rata-rata 5 dengan persentase 25% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator pemerataan sebanyak 31 dengan rata-rata 10 dengan persentase 50% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator pemerataan sebanyak 15 dengan rata-rata 5 persentase 25%.



Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Pemerataan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang tidak mendapatkan Rumah Sehat Layak Huni bernama nuraini pada tanggal 19 mei 2020, peneliti mengajukan pertanyaan, apakah ada masyarakat yang tidak berhak memperoleh rumah layak huni tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“masyarakat yang tidak berhak mendapatkan rumah layak huni adalah yang mana masyarakat memiliki rumah yang memang tidak lagi layak untuk dihuni namun yang saya lihat petugas memberikan rumah layak huni kepada yang berhak saja, , petugas melakukan pekerjaannya sesuai prosedurnya”.*

Sebagai mana yang dikatan dengan masyarakat yang mendapatkan Rumah Sehat Layak Huni bernama afrianti saat di wawancara dengan jawaban yang masih sama :

*“ia memiliki jawabannya yang sama bahwa petugas mengikuti prosedur yang telah ditetapkan”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan terkait prosedur kegiatan dalam Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.9 tersebut dapat disimpulkan

bahwa tanggapan responden Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dinilai Cukup Baik dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

#### 4. Responsivitas

Responsivitas adalah respon atau tanggapan dari penerima program bantuan rumah layak huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir. setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Responsivitas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.10 : Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghuluTentang Indikator Responsivitas Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tidak terjadi penolakan terhadap program rumah layak huni	1	1	1	3
2.	masyarakat nyaman tinggal dirumah tersebut.	0	3	0	3
3.	Masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi	0	2	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>0%</b>	<b>67%</b>	<b>33%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 3 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 1 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 0 orang, cukup baik 3 orang dan yang jawaban kurang baik 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 0 orang, cukup baik 2 orang dan kurang baik 1 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Responsivitas sebanyak 1 dengan rata-rata 0 dan persentase 0% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Responsivitas sebanyak 6 dengan rata-rata 2 dan persentase 67% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Responsivitas sebanyak 2 dengan rata-rata 1 dan persentase 33%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Responsivitas bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu, peneliti mengajukan pertanyaan :Bagaimanakah tindakan petugas dalam melayani masyarakat yang menerima rumah bantuan tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“seperti yang saya lihat para petugas melayani masyarakat dengan cukup baik sesuai dengan kebutuhannya”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : apakah kepuasan dapat diterima oleh masyarakat yang menerima rumah layak huni tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“sebagian masyarakat merasa sangat cukup baik dengan mendapatkan rumah layak huni tersebut namun saya juga mendapat informasi bahwa ada juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan rumah layak huni tersebut namun mereka tidak dapat”*.

**Tabel V.11 : Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Indikator Responsivitas Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tidak terjadi penolakan terhadap program rumah layak huni	4	11	5	20
2.	masyarakat nyaman tinggal dirumah tersebut.	3	16	1	20
3.	Masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi	4	6	10	20
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>55%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 4 orang, cukup baik 11 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 5 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 3 orang, cukup baik 16 orang dan yang jawaban kurang baik 1 orang. Selanjutnya untuk

pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 4 orang, cukup baik 6 orang dan kurang baik 10 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Responsivitas sebanyak 11 dengan rata-rata 4 dan persentase 20% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Responsivitas sebanyak 33 dengan rata-rata 11 dan persentase 55% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Responsivitas sebanyak 16 dengan rata-rata 5 dan persentase 25%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Responsivitas bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang tidak mendapatkan Rumah Sehat Layak Huni yang bernama Ibuk Mariana Pada tanggal 19 Mei 2020 dengan pertanyaan, Apakah masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi dengan adanya program rumah layak huni tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“saya sebagai masyarakat dan masyarakat yang lainnya kami sampai saat ini memiliki motivasi tersendiri untuk berpartisipasi dengan adanya program rumah layak huni ini dari pemerintah provinsi, walaupun saya tidak mendapatkan ditahun 2018 tetapi saya mendapatkan bantuan bedah rumah”.*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Apakah kepuasan dapat dirasakan oleh masyarakat yang menerima rumah layak huni ?

Ia mengatakan bahwa :

*“untuk kepuasan kalau saya cukup puas karna masih ada masyarakat juga yang seharusnya mendapatkan namun mereka belum dapat juga sampai saat ini”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat kurangnya pengetahuan terkait prosedur kegiatan dalam Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.11 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dinilai Cukup Baik dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

#### 5. Ketepatan

Ketepatan adalah nilai atau harga dari tujuan bantuan rumah layak huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir. setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada responden kemudian dilakukan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian mengenai indikator Ketepatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.12 : Penilaian Responden Unsur KepalaDinas, camat dan penghulu Tentang Indikator Ketepatan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Rumah jadihak milik masyarakat	1	2	0	3
2.	Rumah menjadi	0	3	0	3

1	2	3	4	5	6
	tanggung jawab masyarakat				
3.	Rumah lepas dari tanggung jawab pemerintah	0	3	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 3 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 1 orang, cukup baik 2 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 0 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 0 orang, cukup baik 3 orang dan yang jawaban kurang baik 0 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 0 orang, cukup baik 3 orang dan kurang baik 0 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Ketepatan sebanyak 1 dengan rata-rata 0 dan persentase 0% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Ketepatan sebanyak 8 dengan rata-rata 3 dan persentase 100% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Ketepatan sebanyak 0 dengan rata-rata 0 dan persentase 0%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Ketepatan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat, peneliti mengajukan pertanyaan : Apakah Masyarakat yang menerimanya berhak sepenuhnya atas rumah layak huni tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“yang dikatakan masyarakat berhak mendapatkan rumah layak huni ni adalah masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak untuk ditinggal memiliki rumah papan yang lapuk, atap yang tidak bisa untuk berteduh lagi (bocor) dan lain-lain ”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Apakah setelah rumah layak huni diserahkan kepada masyarakat pemerintah tidak ikut campur lagi terkait rumah tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“setelah rumah diserehkan kepada masyarakat maka yang mengurus rumah tersebut adalah pemiliknya”.*

**Tabel V.13 : Penilaian Responden Unsur Masyarakat Tentang Indikator Indikator Ketepatan Pada Penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penilaian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Rumah jadihak milik masyarakat	2	17	1	20
2.	Rumah menjadi tanggung jawab masyarakat	5	10	5	20
3.	Rumah lepas dari tanggung jawab pemerintah	5	9	6	20
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>20%</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>



**Sumber : Data Olahan Peneliti 2020**

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa jawaban keseluruhan 20 responden. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan baik sebanyak 2 orang, cukup baik 17 orang dan yang menjawab kurang baik sebanyak 1 orang . selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan baik sebanyak 5 orang, cukup baik 10 orang dan yang jawaban kurang baik 5 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden yang menjawab baik 5 orang, cukup baik 9 orang dan kurang baik 6 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan baik terhadap indikator Ketepatan sebanyak 12 dengan rata-rata 4 dan persentase 20% sementara itu untuk tanggapan cukup baik terhadap indikator Ketepatan sebanyak 36 dengan rata-rata 12 dan persentase 60% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap indikator Ketepatan sebanyak 12 dengan rata-rata 4 dan persentase 20%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada indikator Ketepatan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang mendapatkan Rumah Sehat Layak Huni bernama bapak Amat B Pada tanggal 19 Mei 2020, dengan pertanyaan, Apakah masyarakat yang menerimanya berhak sepenuhnya atas rumah layak huni tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“iya, itu sepenuhnya menjadi milik kita”*

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan : Apakah setelah rumah layak huni diserahkan kepada masyarakat pemerintah tidak ikut campur lagi terkait rumah tersebut ?

Ia mengatakan bahwa :

*“setelah semuanya selesai maka akan diserahkan kepada masyarakat yang memiliki lokasi tersebut nmaun selama satu tahun itu masih dipantu oleh pemerintah setelah satu tahun maka akan diberikan sepenuhnya kepada pemiliknya dan bebas untuk merenifasi sendiri sesuai keinginnya”*

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat kurangnya pengetahuan terkiat prosedur kegiatan dalam Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan observasi tersebut dan berdasarkan tabel V.13 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dinilai Cukup Baik dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 20 orang.

Namun dalam Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, masih ada terjadi hambatan-hambatan.

**Tabel V.14 : Rekapitulasi Unsur KepalaDinas, camat dan penghulu Tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Efektifitas	1	2	0	3
2.	Kecukupan	1	1	1	3
3.	Pemerataan	1	2	0	3
4.	Responsivitas	0	2	1	3
5.	Ketepatan	0	3	0	3
1	2	3	4	5	6
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>15</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
	<b>Persentase</b>	<b>33%</b>	<b>67%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur KepalaDinas, camat dan penghulu Tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 3 atau jika dipersentasekan sebesar 33% dengan rata-rata 1, sedangkan cukup baik yaitu 10 atau jika dipersentasekan sebesar 67% dengan rata-rata 2, sedangkan kurang baik yaitu 2 atau jika dipersentasekan sebesar 0% dengan rata-rata 0.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.14 pada indikator Efektifitas rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik 2 tanggapan dan kurang baik 0 tanggapan. Sementara itu untuk indikator Kecukupan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik 1 tanggapan, kurang baik 1 tanggapan, indikator Pemerataan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 1 tanggapan, cukup baik sebanyak 2 tanggapan, kurang baik 0 tanggapan, indikator Responsivitas rata-rata responden memberikan jawaban baik 0 tanggapan, cukup

baik 2 tanggapan, kurang baik 1 tanggapan, untuk indikator Ketepatan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 0 tanggapan, cukup baik sebanyak 3 dan kurang baik sebanyak 0 tanggapan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dikategori **“Cukup Baik”**. Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 10 tanggapan dibandingkan baik dengan nilai 3 dan kurang baik 2 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin, sehingga masyarakat belum secara keseluruhan mengetahuinya.

**Tabel V.15 : Rekapitulasi Unsur Masyarakat Tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

No	Item Penelitian	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Efektifitas	5	8	7	20
2.	Kecukupan	4	10	6	20
3.	Pemerataan	5	10	5	20
4.	Responsivitas	4	11	5	20
5.	Ketepatan	4	12	4	20
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>100</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
	<b>Persentase</b>	<b>20%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Peneliti 2020*

Tabel diatas tentang Rekapitulasi Unsur Masyarakat Tentang Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dari rekapitulasi data diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden yang berpendapat Baik yaitu sebanyak 22 atau jika

dipersentasekan sebesar 20% dengan rata-rata 4, sedangkan cukup baik yaitu 51 atau jika dipersentasikan sebesar 50% dengan rata-rata 10, sedangkan kurang baik yaitu 27 atau jika dipersentasikan sebesar 25% dengan rata-rata 5.

Dari hasil analisis data yang dilakukan yang terlihat dalam tabel V.15 pada indikator Efektifitas rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 5 tanggapan, cukup baik 8 tanggapan dan kurang baik 7 tanggapan. Sementara itu untuk indikator Kecukupan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik 10 tanggapan, kurang baik 6 tanggapan, indikator pemerataan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 5 tanggapan, cukup baik sebanyak 10 tanggapan, kurang baik 5 tanggapan, indikator Responsivitas rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik sebanyak 11 tanggapan, kurang baik 5 tanggapan, untuk indikator Ketepatan rata-rata responden memberikan jawaban baik sebanyak 4 tanggapan, cukup baik sebanyak 12 dan kurang baik sebanyak 4 tanggapan.

Maka dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dikategori **“Cukup Baik”**.

Karena dapat dilihat berdasarkan jumlah keseluruhan tanggapan responden yakni cukup baik dengan nilai tertinggi 51 tanggapan dibandingkan baik dengan nilai 22 dan kurang baik 27 tanggapan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan-hambatan Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi

Mayarakat Miskin, sehingga masyarakat belum secara keseluruhan mengetahuinya.

### **C. Hambatan-hambatan yang di hadapi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018**

#### **1. Indikator Efektifitas**

Efektifitas merupakan bentuk membandingkan pekerjaan yang sudah dirumuskan atau dipola dengan hasil yang telah dicapai. Berdasarkan hasil analisis kuisioner dan wawancara yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas, camat dan penghulu serta masyarakat indikator efektifitas bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**. Pada indikator Efektifitas ini ada terdapat hambatan dalam Pembangunan seperti cat untuk bangunan itu kurang berkualitas dimana bisa dilihat dari ketahanan cat tersebut seperti mudah pudar terkena panas dan hujan, dan cepat keropos.

#### **2. Indikator Kecukupan**

Yang dimaksud yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat. Berdasarkan hasil analisis kuisioner dan wawancara yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas, camat dan penghulu serta masyarakat indikator Kecukupan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Mayarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”** Dan untuk indikator kecukupan tidak

ditemukan hambatan dalam pengerjaannya karena rumah bantuan sudah menjadi milik masyarakat dan diserahkan juga kepada masyarakat yang mendapatkan.

### 3. Indikator Pemerataan

Pemerataan adalah membuat pembangunan secara merata terhadap masyarakat miskin dari program bantuan rumah sehat layak huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir. Berdasarkan hasil analisis kuisioner dan wawancara yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas, camat dan penghulu serta masyarakat indikator Pemerataan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**. Untuk indikator Pemerataan tidak ada hambatan dalam pengerjaan karena sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah provinsi, dibangun ditempatkan diatas lokasi yang seharusnya.

### 4. Indikator Responsivitas

Responsivitas adalah respon atau tanggapan dari penerima program bantuan rumah layak huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir. Berdasarkan hasil analisis kuisioner dan wawancara yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas, camat dan penghulu serta masyarakat indikator Responsivitas bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya **“Cukup Baik”**. Untuk indikator Responsivitas ini terdapat beberapa hambatan diantaranya masih adanya dari staff-staff dari kepenghuluan-kepenghuluan yang ada dikecamatan pujud itu tidak mengerti akan prosedur dari

pengajuan untuk program Rumah Layak Huni tersebut, ada kepala Desa nya yang tidak mau ambil pusing dari Program Pemerintah Provinsi ini karena pendanaan yang minim. Kepenghuluan-kepenghuluan yang tidak ikut dalam menjalankan program tersebut diantaranya, Kelurahan Pujud Selatan, Kepenghuluan Pujud Utara, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kepenghuluan Siarang-arang, dan Kepenghuluan kasang Bangsawan.

#### 5. Indikator Ketepatan

Ketepatan adalah nilai atau harga dari tujuan bantuan rumah layak huni dikecamatan pujud kabupaten rokan hilir. Berdasarkan hasil analisis kuisioner dan wawancara yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan pada Unsur Dinas, camat dan penghulu serta masyarakat indikator Ketetapan bahwa responden menilai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Dikecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 hasilnya “**Cukup Baik**”. Indikator Ketetapan ini tidak ditemukan hambatan dalam pengerjaannya karena pemerintah sudah memberikan dan melimpahkan sepenuhnya rumah bantuan itu kepada masyarakat yang berhak.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis buat mengenai Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin diKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2018. Penulis menyimpulkan dan saran sebagai masukan untuk pihak terkait terutama untuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kepenghuluan. Adapun kesimpulan dan sarannya sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan kepada desa tetapi dengan data yang tidak akurat, seperti masyarakat itu tidak memiliki sebidang lahan dan tanda bukti rumah yang tidak layak itu berdiri diatas lahan tersebut, dan bertempat tinggal dirumah yang disewa ataupun menumpang mendirikan bangunan rumah dilahan milik orang lain.
2. Adapun yang menjadi hambatan pada penelitian Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin diKecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2018 ini adalah Kualitas bangunan yang masih kurang baik yang mana dilihat pada pemberin cat rumah yang tidak sesuai dengan kualitas, Masih banyaknya pegawai dikepenghuluan-penghuluan yang ada dipujud yang tidak memahami prosedur dalam menangani dan pengajuan permohonan rumah layak huni.

#### B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis pada penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang hendak mengajukan diri untuk Program Rumah Sehat Layak Huni dari pemerintah harus memenuhi persyaratan dengan benar.
2. Perlunya peningkatan kinerja dan pemahaman terhadap prosedur mengenai program penyediaan rumah layak huni.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Subekhi dan Muhammad Jauhar. 2012. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Penerbit, Alfabeta, Bandung.
- Brasz. 1975. *Inleiding tot de Bestuurswetenschap*. Boekeri, hlm.;
- Bryan, Carobe dan Louis. G. White, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta.
- Budiani, Ni Wayan 2007, Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Gibson, dkk. 1984. *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses* (Terjemahan : Djoerban Wahid). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Dunn William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Madha University Press.
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Ekowati, Maroro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta, Pustaka Cakra.
- Erni, Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Prenada Media.
- Finer, Samuel, E, *Comparative government*, Penguin Book Ltd, Harmend Worth, Middlesex, England. 1947.
- Gie, The Liang. 1981. *Unsur-Unsur Administrasi Suatu Kumpulan Karangan*. Edisi III, Supersukses.
- Haririson, Lisa. 2007. *Metode Penelitian Politik*. Edisi Pertama, Jakarta, Kencana.
- Hikmat, Harry. 2001 *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Helimania Utama press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Labobo, 2007, *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Press
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara* .Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2010. *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta

- \_\_\_\_\_, 2005, *Kybernology Beberapa Konstruksi Utama*, Jakarta, PT. Rhineka Sirao Credantia Center.
- Nick Devas et al, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Nugroho Riant D, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi*. Pt Elekmedia Komputindo, Jakarta.
- Rasyid, m.Riyas, 2000. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, Yasril Witampone.
- Rauf, Rahyunir. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- R. M. Iver. 1947. *The Web Of Government*. The Mac Millan Company Ltd. New.
- Sadad, Abdul. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Pengaruh Pemotivasian Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai)*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta. Bandung.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governnace : Kepemimpinan yang Baik*. Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effenadi, 1995. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Steers, Richard.M.2014. *Efektivitas Organisasi* (penerjemah Magdalena Jamin).Jakarta : Penerbit Erlangga
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions, Sidgwick and Jakson Ltd.*, London., 1960.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektifitas Implementasi kebijakan otonomi daerah*.Citra Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2007. *Pemberdayaan Sosial*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung : CV.Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2013.*Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV.Alfabeta
- \_\_\_\_\_.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV.Alfabeta
- Suyanto B.& Sutinah, 2011. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Kencana.
- Syafii, Kencana, Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Pt. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_.2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1974.
- Todaro, M. 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga
- Usman, Husaini. 2009. *Metode Penelitian Social. Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yusmar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

**Dokumentasi :**

Buku *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa : Edisi Revisi, 2013*. Pekanbaru, Universitas Islam Riau.

**Peraturan Perundangan :**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Tahun 1945 Tentang Keuangan Negara  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah .

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Hunu Menjadi Layak Huni.

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 Tentang pedoman belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.